

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PERINTIS



**TOTAL BENCHMARKING SEBAGAI ALAT MENILAI
KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR PERANTARA
KEUANGAN**

Oleh :
Bayu Sarjono, SE.,Ak.,M.Ak.,BKP.,CA

**POLITEKNIK UBAYA, SURABAYA
OKTOBER 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Total Benchmarking Sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Perantara Keuangan
Nama Rumpun Ilmu	: Perpajakan
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Bayu Sarjono, SE.,Ak.,M.Ak.,BKP.,CA
b. NPK / NIDN	: 214140
c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli 150
d. Fakultas / Program Studi	: Politeknik Ubaya / Perpajakan
e. HP	: 08993652552
f. Alamat e-mail	: bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: -
b. NPK / NIDN	: -
c. Fakultas / Program Studi	: -
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: -
b. NPK / NIDN	: -
c. Fakultas / Program Studi	: -
Lama Penelitian Keseluruhan	
Penelitian tahun Ke	: 1 dari 1 tahun
Biaya Yang Diusulkan	: -


Surabaya, 08 Oktober 2019

Menyetujui,


Direktur Politeknik Ubaya

Agung Sri Wardhani, SE.,MA
NPK : 201029

Ketua Peneliti


Bayu Sarjono, SE.,Ak.,M.Ak.,BKP.,CA
NPK : 214140

Menyetujui,

Ketua BPPM

Claudia Bona, SS.,MM
NPK : 202025

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang penggunaan rasio total benchmarking sebagai alat untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada sektor keuangan. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah 14 rasio total benchmarking yang meliputi Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Pretax Profit Margin (PPM), Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), Net Profit Margin (NPM), Dividend Payout Ratio (DPR), Rasio PPN (pn), Rasio Gaji/Penjualan (g), Rasio Bunga/Penjualan (b), Rasio Sewa/Penjualan (s), Rasio Penyusutan/Penjualan (py), Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl), Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl), Rasio Input Lainnya/Penjualan (x). Penggunaan Sektor Perantara Keuangan dikarenakan sektor ini menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar ketiga selama 5 (lima) tahun terakhir setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran.

Target luaran dalam penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan secara ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi yang memiliki ISSN atau prosiding yang terkait dengan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan perhitungan rasio dan membandingkan dengan benchmark yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan melakukan perbandingan tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan rasio total benchmarking untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan memberikan masukan bagi para akademisi di bidang perpajakan untuk terus dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak di masa mendatang.

Kata kunci : *Total Benchmarking*, Kepatuhan Wajib Pajak, Kewajiban perpajakan.

PRAKATA

Puji dan Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kemajuan Penelitian Dosen Pemula ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam penelitian ini kami membahas mengenai **“TOTAL BENCHMARKING SEBAGAI ALAT MENILAI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR PERANTARA KEUANGAN”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kemajuan Penelitian ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada penelitian ini. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penelitian kami selanjutnya.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surabaya, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu.....	6
2.2. Landasan Teori.....	7
2.2.1. Konsep Benchmarking.....	7
2.2.2 Total Benchmarking.....	9
2.2.3. Tujuan dan Manfaat Total Benchmarking.....	10
2.2.4. Proses dan metode penetapan benchmark.....	10
2.2.5. Rasio-rasio Benchmark.....	12
2.2.6. Pemanfaatan Rasio Benchmark.....	16
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	18
3.1. Rancangan Penelitian.....	18
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	18
3.4. Teknik Analisis Data.....	19
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1 Deskripsi Umum Sampel Penelitian.....	20
4.2 Data Benchmarking Perpajakan Berdasarkan KLU.....	24
4.3 Peengujian Kepatuhan wajib Pajak.....	25
4.4 Perhitungan Rasio Benchmarking Perusahaan Bank Devisa.....	25
4.5 Perhitungan Rasio Benchmarking Perusahaan Asuransi.....	34
4.6 Perhitungan Rasio Benchmarking Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	39
4.7 Analisis Rasio Benchmarking Sektor Perantara Keuangan.....	43
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Per Sektor Dalam 5 Tahun Terakhir.....	4
Tabel 2.1	Elemen-Elemen Data untuk Penetapan Benchmark.....	11
Tabel 2.2	Contoh Laporan Laba Rugi.....	13
Tabel 5.1	Laporan Keuangan Perusahaan KLU Perbankan.....	20
Tabel 5.2	Laporan Keuangan Perusahaan KLU Asuransi.....	22
Tabel 5.3	Laporan Keuangan Perusahaan KLU Pembiayaan Konsumen.....	23
Tabel 5.4	Data Rasio Benchmarking Sektor Perantara Keuangan Tahun 2005.....	24
Tabel 5.5	Data Rasio Benchmarking Sektor Perantara Keuangan Tahun 2006.....	24
Tabel 5.6	Data Rasio Benchmarking Sektor Perantara Keuangan Tahun 2005.....	24

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendanaan suatu Negara, baik dengan tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Faktor dominan dari pajak tersebut, menyebabkan banyak kepentingan ada di dalamnya. Mulai dari kepentingan orang pribadi, pengusaha, badan usaha hingga kepentingan politik. Banyaknya kepentingan yang mendominasi perpajakan, menyebabkan timbulnya perilaku yang menyimpang berupa kepatuhan yang semu atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sebaliknya adanya kepentingan tersebut merupakan suatu “peluang emas” bagi pejabat perpajakan untuk menjadikan pajak sebagai suatu objek untuk mendapatkan apa yang diharapkannya. Dua kepentingan dari pihak-pihak yang berbeda, namun pada inti tujuannya sama, menghasilkan persamaan persepsi tentang bagaimana menggunakan peraturan perpajakan sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal perpajakan.

Dari sisi fiskus persepsi yang salah ini berkembang menjadi persepsi yang kurang tepat, yaitu fiskus mengenakan pajak dilatarbelakangi target-target penerimaan. Secara mikro, persepsi bahwa fiskus akan mengenakan pajak yang sebesar-besarnya adalah tidak benar, karena tidak seorangpun Wajib Pajak yang berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi tidak seorangpun Wajib Pajak akan dikenakan pajak melebihi dari yang seharusnya. Sedangkan dari sisi Wajib Pajak, persepsi bahwa Wajib Pajak akan berusaha untuk membayar pajak yang sekecil-kecilnya juga tidak benar karena ada perbedaan yang mendasar antara sistem pemungutan pajak yang lama dengan yang baru. Dalam sistem pemungutan yang baru yaitu *self assesment system* Wajib Pajak tidak dianggap sebagai objek tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang sesungguhnya terutang pada Negara. Sedangkan fiskus hanya memberikan penyuluhan, pembinaan, pengawasan serta koreksi-koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak penghasilannya masih sangat rendah. Dari sekitar 240 juta jiwa penduduk di Indonesia, yang terdaftar sebagai wajib pajak

baru 19,9 juta jiwa dan yang melaporkan hanya 8,8 juta jiwa. Untuk mendukung pelaksanaan sistem *self assessment* dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak perlu memiliki sarana yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan ketidakpatuhan maupun penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Setiap tahun target penerimaan pajak selalu meningkat. Penerimaan pajak pada akhir Desember 2012 hanya mencapai Rp831,3 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan sebesar Rp879,4 triliun. Secara keseluruhan penerimaan perpajakan hanya tercatat Rp980,1 triliun atau 96,4 persen dari target Rp1.061,2 triliun. Pemerintah akan berupaya mengejar target penerimaan pajak pada 2013 yang ditetapkan sebesar Rp1.031,8 triliun karena penerimaan pajak 2012 tidak sesuai harapan. (antaranews.com). Dirjen Pajak hingga saat ini masih dan akan menjalankan tujuh langkah strategis guna mengamankan penerimaan pajak yaitu: Perbaikan Sistem Administrasi PPN; Intensifikasi potensi pajak sektor-sektor strategis; Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional mulai 1 Mei 2012; Peningkatan Penegakan Hukum; Penyempurnaan Sistem Piutang *On-Line*; Peningkatan kualitas SDM, terutama *Account Representative* (AR), Pemeriksa, Penelaah Keberatan dan Juru Sita; Penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio total benchmarking tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut :Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha, Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan, Ada keterkaitan antar rasio benchmark, Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan Perpajakannya.

Benchmarking merupakan suatu proses yang telah secara umum diterapkan dalam dunia usaha. *Benchmarking* dalam dunia bisnis merupakan suatu proses sistematis dalam membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dalam melakukan *benchmarking*, suatu organisasi membandingkan nilai-nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding². Dengan melakukan perbandingan tersebut, perusahaan dapat melakukan

evaluasi dan kemudian menentukan langkah yang sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Model ini diadopsi pula oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan berasumsi bahwa wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing-masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang mewakili karakteristik wajib pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan perbandingan tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai. Namun terdapat perbedaan antara rasio benchmarking pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI dibandingkan dengan acuan rasio benchmarking yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Terdapat perbedaan pada setiap rasio, yaitu perbedaan terbesar terdapat pada rasio pembayaran deviden (DPR), yaitu rata-rata sebesar 31.50% jauh dibawah benchmark. Sedangkan perbedaan terkecil terdapat pada rasio Sewa(s) yaitu rata-rata sebesar 0.13% dibawah benchmark, yang dapat diartikan bahwa setiap perusahaan memiliki karakter dan kondisi keuangan yang berbeda-beda, jadi rasio total benchmarking pada Dirjen pajak tidak bisa digunakan digunakan secara mutlak untuk menilai kewajaran pelaporan perpajakannya, akan tetapi hanya sebagai indikator dalam pemeriksaan kepatuhan perpajakan pada perusahaan (Theresia:2011)

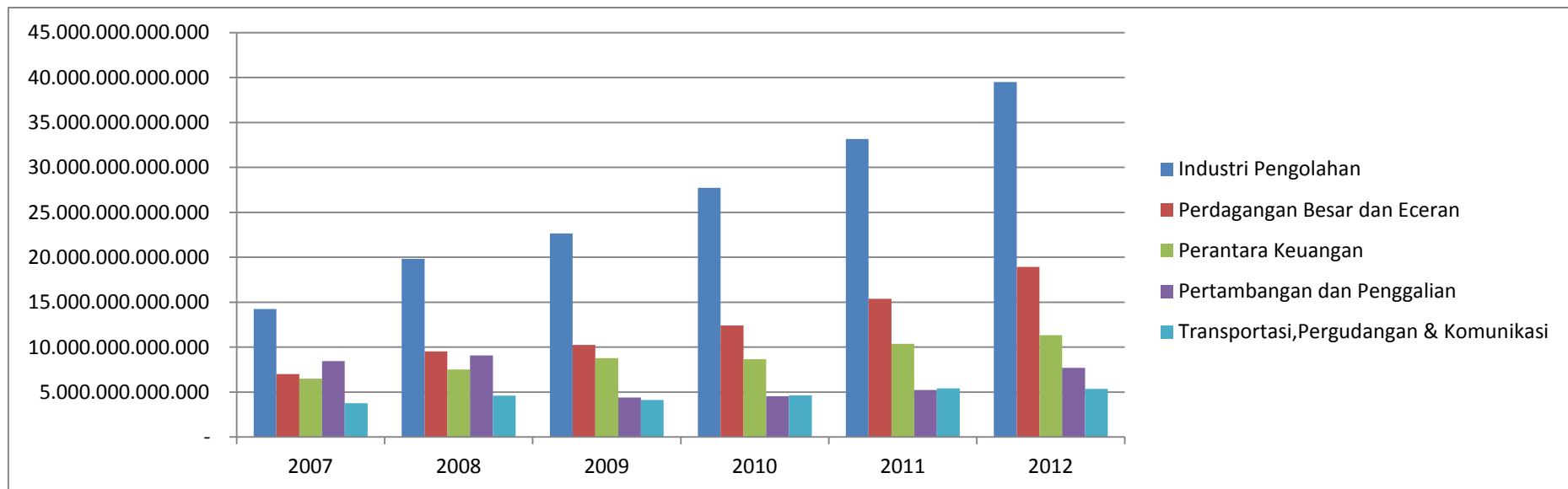
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah *rasio total benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak telah menggambarkan keadaan riil dari Wajib Pajak Indonesia.. Penggunaan Sektor Perantara Keuangan dikarenakan sektor ini menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. (lihat Tabel 1.1)

Dalam hal intensifikasi potensi pajak sektor-sektor strategis, pemerintah, dalam hal ini DJP, masih mengandalkan sembilan sektor strategis, yaitu :Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran (PBE); Perantara Keuangan; Pertambangan; *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan; Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (TPK); Konstruksi; Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (PPK); Penyedia Listrik, Gas, dan Air (LGA). Sampai akhir bulan Februari 2012, industri pengolahan menyumbang pajak sebesar Rp 39,49 triliun, sektor PBE Rp 18,91 triliun, sektor perantara keuangan Rp 11,33 triliun, sektor pertambangan Rp 7,68 triliun, sektor *real estate* 5,5 triliun, sektor TPK Rp 5,36 triliun, sektor konstruksi 4 triliun, sektor PPK 2,7 triliun, dan sektor penyedia LGA memberi kontribusi bagi penerimaan pajak nasional sebesar 1,8 triliun.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Per Sektor sampai dengan Februari 2012 Dalam 5 Tahun Terakhir

KATEGORI	SEKTOR	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D	Industri Pengolahan	14.225.221.658.778	19.811.058.114.803	22.651.811.925.418	27.724.032.552.254	33.164.303.769.286	39.493.603.434.352
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang keperluan pribadi dan Rumah Tangga	7.014.268.122.690	9.510.405.450.810	10.259.042.625.512	12.422.267.793.784	15.377.599.396.058	18.915.225.807.590
J	Perantara Keuangan	6.482.017.378.827	7.512.874.866.197	8.783.348.358.652	8.658.099.823.214	10.366.606.829.212	11.331.811.795.206
C	Pertambangan dan Penggalan	8.432.406.392.538	9.059.951.873.629	4.389.256.512.244	4.550.305.261.547	5.246.336.119.822	7.687.351.311.578
I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3.771.338.277.826	4.605.844.921.254	4.133.944.726.086	4.642.221.271.956	5.425.718.996.356	5.358.938.454.946

Sumber : www.pajak.go.id



1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Apakah kinerja keuangan Perusahaan di Sektor Perantara Keuangan sudah memenuhi rasio *total benchmarking* dalam menilai kewajaran laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab masalah penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada Perusahaan Sektor Perantara Keuangan berdasarkan rasio total benchmarking
- b. Sebagai antisipasi bagi Wajib Pajak terhadap konsekuensi di bidang perpajakan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Kontribusi Empiris
Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pemanfaatan total benchmarking dalam menilai kewajaran laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada sektor perantara keuangan
- b. Kontribusi Kebijakan
Diharapkan Dirjen Pajak dapat segera menambah jumlah data benchmarking untuk tahun 2008 ke atas dan memperluas klasifikasi lapangan usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dijelaskan beberapa penelitian empiris yang membahas tentang rasio total benchmarking antara lain :

1. Nyoman Darmayasa dan Nyoman Sentosa Hardika. (2011) yang meneliti Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak. Perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Oleh karena itu, penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada

tahap ini dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Rasio *total benchmarking* merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak. Rasio *total benchmarking* sudah ditetapkan sampai pada tahap V dengan total 105 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Dalam penyusunan perencanaan pajak, Wajib Pajak harus memperhatikan rasio-rasio yang sesuai dengan KLU perusahaannya. sehingga bisa terhindar adanya himbauan dari KPP dan tahapan konseling.

Strategi penghematan pajak untuk mengefisienkan beban pajak menyangkut strategi untuk mengefisienkan beban PPh Badan dan PPN. Strategi untuk mengefisienkan beban PPh Badan meliputi : pemilihan alternatif dasar pembukuan, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, pemilihan metode penilaian persediaan, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud, pemberian bonus kepada pembeli, transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*, penyertaan pada perseroan terbatas dalam negeri, optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. permohonan penuntunan penibayaran *lump-sum*. Sedangkan strategi untuk mengefisienkan beban PPN meliputi: memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan.

2. Theresia Woro Damayanti, dan Eko Sukmono A (2011). Yang meneliti tentang Ratio *Total Benchmarking* Sesuikah Dengan Kondisi Wajib Pajak? (Studi Pada Empat Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di BEI). Bahwa terdapat perbedaan antara rasio benchmarking pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI dibandingkan dengan acuan rasio benchmarking yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Terdapat perbedaan pada setiap rasio, yaitu perbedaan terbesar terdapat pada rasio pembayaran deviden (DPR), yaitu rata-rata sebesar 31.50% jauh dibawah benchmark. Sedangkan perbedaan terkecil terdapat pada rasio Sewa(s) yaitu rata-rata sebesar 0.13% dibawah benchmark, yang dapat diartikan bahwa setiap perusahaan memiliki karakter dan kondisi keuangan yang berbeda-beda, jadi rasio total benchmarking pada Dirjen pajak tidak bisa digunakan digunakan secara mutlak untuk menilai kewajiban pelaporan perpajakannya, akan tetapi hanya sebagai indikator dalam pemeriksaan kepatuhan perpajakan pada perusahaan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Benchmarking

Sistem pengukuran kinerja merupakan kunci untuk memandu dan menguji hasil dari proses perbaikan, tetapi tidak mengindikasikan bagaimana suatu proses harus di perbaiki. Salah satu pendekatan yang dapat membantu melengkapi hal tersebut adalah *benchmarking*. Dattakumar (2003) menyimpulkan bahwa pendekatan *benchmarking* dapat digunakan untuk perbaikan terus menerus. Hasil *review* Grunberg (2003) terhadap metoda-metoda yang digunakan untuk perbaikan kinerja aktivitas operasional pada perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa pendekatan *benchmarking* juga memungkinkan untuk digunakan. Gleich *et al.* (2008) menyebutkan bahwa *benchmarking* dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pada berbagai area.

Berbagai definisi *benchmarking* antara lain 1) merupakan suatu proses untuk mengukur kinerja terhadap perusahaan yang terbaik dalam kelasnya, kemudian menggunakan analisis untuk memenuhi dan melebihi perusahaan tersebut (Pryor dan Katz 1993 dalam Yasin 2002), 2) pencarian praktek terbaik yang mengarah kepada kinerja yang sangat baik apabila praktek-praktek tersebut diterapkan (Partovi 1994), 3) proses identifikasi dan pembelajaran dari praktek terbaik dimanapun di dunia (Allan 1997 dalam Elmuti dan Yunus 1997), dan 4) perbandingan sistematis terhadap proses dan kinerja untuk menciptakan standar baru dan atau meningkatkan proses (Steven *et al.* 2003).

Benchmarking dapat dipergunakan dalam berbagai industri, baik jasa dan manufaktur. Perusahaan-perusahaan melakukan *benchmarking* karena berbagai alasan. Alasan bisa umum, seperti peningkatan produktivitas atau bisa spesifik, seperti peningkatan desain tertentu. (Muschter 1997 dalam Elmuti dan Yunus 1997). Alasan-alasan yang digunakan pada dasarnya merupakan upaya organisasi dalam rangka perbaikan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka metode *benchmarking* dapat digunakan untuk melakukan analisis perbaikan kinerja.

Aplikasi *benchmarking* dalam perbaikan kinerja telah banyak dilakukan. Di mulai pada akhir 1970 oleh Xerox Corporation yang memutuskan untuk membandingkan operasional perusahaannya dengan L.L. Bean yang memiliki produk yang berbeda namun memiliki karakteristik fisik yang sama (Tucker *et al.* 1987 dalam Elmuti dan Yunus 1997). Oleh karena itu, pengelompokan organisasi yang memiliki karakteristik yang serupa perlu dilakukan sebelum proses *benchmarking*.

Hasil yang dicapai melalui penerapan praktek *terbaik* dari L.L. Bean adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas (Tucker *et al.* 1987 dalam Yasin 2002). Selain itu,

menurut Dragolea dan Cotirlea (2009) manfaat *benchmarking* antara lain yaitu 1) perbaikan terus menerus untuk mencapai kinerja yang lebih baik menjadi budaya organisasi, 2) meningkatkan pengetahuan terhadap kinerja produk dan jasa, dan 3) membantu dalam memfokuskan sumberdaya untuk mencapai target.

Perkembangan konsep *benchmarking* dapat diklasifikasikan ke dalam lima generasi (Watson 1996; Ma'arif dan Hendri 2003; Denkena *et al.* 2006; Martin 2008; Anand dan Kodali 2008; Dragolea dan Cotirlea 2009; Moriarty dan Smallman 2009) yaitu 1) *Reverse engineering* (berorientasi pada produk yang meliputi perbandingan karakteristik, kegunaan dan kinerja produk) ; 2) *Competitive benchmarking* (berorientasi pada efisiensi dalam menghasilkan produk); 3) *Process benchmarking* (berorientasi pada proses-proses bisnis tertentu yang menjadi sasaran analisis); 4) *Strategic benchmarking* (berorientasi pada perubahan yang mendasar dengan mengadaptasi strategi-strategi sukses); dan 5) *Global benchmarking* (berorientasi pada perbedaan-perbedaan budaya serta proses perencanaan strategis). Williams (2008) mengkategorikan *benchmarking* ke dalam dua tipe yaitu 1) *internal benchmarking*, dan 2) *eksternal benchmarking*.

Pierre dan Delisle (2006) mengusulkan sistem diagnosa berbasis pengetahuan pakar untuk melakukan *benchmarking* kinerja. Organisasi atau perusahaan yang berbeda memiliki metoda *benchmarking* sendiri, namun apapun metode yang digunakan, langkah-langkah utamanya adalah sebagai berikut : 1) pengukuran kinerja dari variabel-variabel kinerja terbaik pada kelompoknya relatif terhadap kinerja kritikal; 2) penentuan bagaimana tingkat-tingkat kinerja dicapai; dan 3) penggunaan informasi untuk pengembangan dan implementasi dari rencana peningkatan (Omachonu dan Ross 1994 *dalam* Elmuti dan Yunus 1997).

2.2.2. Total Benchmarking

Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dengan demikian total benchmarking memiliki karakteristik:

- a. Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha.
- b. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan.

- c. Hubungan keterkaitan antar rasio-rasio diperhatikan.
- d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Rasio merupakan alat yang penting dalam melakukan analisa laporan keuangan. Rasio (%) digunakan untuk mengkonversi angka-angka dalam laporan keuangan ke dalam bentuk yang lebih layak untuk diperbandingkan dengan data tahun-tahun lainnya untuk satu wajib pajak (vertikal) ataupun dibandingkan antar wajib pajak dalam bidang industri tertentu (horizontal). Rasio bisa lebih menggambarkan posisi satu wajib pajak dibandingkan dengan wajib pajak lainnya dalam satu industri yang sama dibandingkan dengan angka-angka rupiah laporan keuangan. Secara umum, analisa rasio akan berguna untuk:

- a. memahami kinerja satu industri;
- b. membandingkan kinerja perusahaan (wajib pajak) dengan benchmark-nya;
- c. melakukan komparasi dengan tahun-tahun lainnya;
- d. membantu dalam menentukan tingkat risiko ketidakpatuhan di wajib pajak.

Untuk lebih mendayagunakan analisa rasio, perlu dilakukan penetapan standar kinerja operasional untuk wajib pajak dalam satu bidang usaha tertentu atau dibuat satu benchmark (patokan) kinerja yang nantinya akan digunakan untuk mengukur apakah kinerja satu wajib pajak kurang, sesuai atau melebihi benchmark-nya. Hal ini didasari asumsi bahwa kelompok wajib pajak dalam satu industri tertentu akan mempunyai perilaku biaya yang cenderung sama. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan adalah proses pembuatan benchmark itu sendiri. Metode statistik seperti rata-rata, median, simpangan dan simpangan baku akan sangat membantu dalam membuat benchmark yang dapat diandalkan. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah data yang digunakan untuk membuat benchmark dan analisisnya serta variabel-variabel yang dianggap mewakili dalam menentukan kinerja satu wajib pajak dalam industri tertentu. Benchmarking seringkali menjadi pintu masuk oleh *Account Representative* dalam menilai tingkat kewajaran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak.

2.2.3. Tujuan dan Manfaat Total Benchmarking

Tujuan Total Benchmarking antara lain :

- a. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak;
- b. Membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.

Sedangkan Manfaat Total Benchmarking adalah :

- a. Supporting tools bagi program intensifikasi penggalan potensi pajak;
- b. Alat bantu dalam penghitungan *tax gap*.

2.2.4. Proses dan metode penetapan benchmark

Total benchmarking merupakan salah satu dari langkah strategis yang berkaitan dengan upaya penggalan potensi penerimaan pajak untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2009 dan tahun-tahun selanjutnya. Program ini merupakan bagian dari program penggalan potensi pajak melalui program mapping, profiling, benchmarking, pertukaran data dan perekaman. Penetapan rasio-rasio benchmark secara teknis dilakukan sebagai berikut:

1. Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003.
2. Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
3. Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007.
4. Sumber data yang digunakan dalam tahap awal pembentukan benchmark adalah data internal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari :
 - Elemen-elemen Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan;
 - Elemen-elemen Surat Pemberitahuan Masa PPN;
 - Elemen-elemen transkrip Laporan Keuangan.

Penghitungan semua rasio selain rasio PPN menggunakan elemen data hasil perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Data penjualan, HPP, Laba bersih dari Operasi, Laba Sebelum Pajak diambil dari formulir 1771 Lampiran I, sedangkan data PPh terutang diambil dari hasil perekaman induk formulir 1771. Data-data gaji, sewa, bunga, penyusutan, dan biaya-biaya lain diambil dari perekaman formulir 1771 Lampiran II. Apabila data perekaman formulir 1771 Lampiran II tidak lengkap, maka data tersebut dilengkapi menggunakan data perekaman transkrip Laporan Keuangan. Data Pajak Masukan diperoleh dari perekaman SPT PPN.

Tabel 2.1

Elemen-Elemen Data untuk Penetapan Benchmark

Uraian	Nama Elemen SPT	Sumber
Penjualan	Pedaran usaha	Form 1771-I no 1a
Harga Pokok Penjualan	Harga Pokok Penjualan	Form 1771-I no 1b
Laba bersih dari operasi	Penghasilan netto dari Usaha	Form 1771-I no 1d
Laba bersih sebelum pajak	Jumlah Penghasilan Netto Komersial	Form 1771-I no 3
PPH Terutang	PPH Terutang	Form 1771 no 4
Biaya Gaji	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honor, THR, dsb	Form 1771-II no 2 kol 3 + 4
Beban Bunga	Biaya bunga pinjaman	Form 1771-II no 6 kol 3 + 4
Beban Sewa	Biaya sewa + Biaya Royalti	Form 1771-II no 5 kol 3 + 4, + Form 1771-II no. 9 kol 3 + 4
Penyusutan dan amortisasi	Biaya penyusutan dan amortisasi	Form 1771-II no 4 kol 3 + 4
Penghasilan dari luar usaha	Penghasilan dari luar usaha	Form 1771-I no 1e
Biaya dari luar usaha	Biaya dari luar usaha	Form 1771-I no 1f
Biaya Lain	Biaya Transportasi	Form 1771-II no 3 kol 3 + 4
	Biaya sehubungan dengan jasa	Form 1771-II no 7 kol 3 + 4
	Biaya piutang tak tertagih	Form 1771-II no 8 kol 3 + 4
	Biaya pemasaran/promosi	Form 1771-II no 10 kol 3 + 4
	Biaya lainnya	Form 1771-II no 11 kol 3 + 4
Pajak Masukan	Pajak Masukan	Form 1195 D.1.6 (2005-2006); Form 1107 B no. 1C atau 2C (2007) masa Jan-Des

2.2.5. Rasio-rasio Benchmark

Rasio-rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi 14 rasio yang terdiri dari rasio-rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN dan rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan 14 rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Rasio-rasio tersebut meliputi:

1. Gross Profit Margin (GPM)
2. Operating Profit Margin (OPM)
3. Pretax Profit Margin (PPM)
4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)
5. Net Profit Margin (NPM)
6. Dividend Payout Ratio (DPR)
7. Rasio PPN (pn)
8. Rasio Gaji/Penjualan (g)

9. Rasio Bunga/Penjualan (b)
10. Rasio Sewa/Penjualan (s)
11. Rasio Penyusutan/Penjualan (py)
12. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)
13. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)
14. Rasio Input Lainnya/Penjualan (x)

Dengan mengukur rasio GPM, OPM, PPM, CTTOR, NPM, pl, dan bl didapatkan gambaran yang utuh mengenai kegiatan/operasi perusahaan dalam suatu tahun pajak sebagaimana tercermin dalam Penghitungan Laba Rugi (income statement) perusahaan. Pengukuran secara utuh tersebut diperlukan agar aparat pajak dapat melakukan diagnosa secara tepat dalam menentukan elemen apa dari penghitungan rugi laba perusahaan tersebut yang mengindikasikan ketidakwajaran. Pada prinsipnya, rasio-rasio tersebut merupakan rasio yang dihasilkan dari analisis vertikal suatu Penghitungan Laba Rugi Perusahaan (Lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2.

Contoh Laporan Laba Rugi

Perhitungan Laba Rugi PT ABC periode 1 Januari - 31 Desember 200X			
	Rupiah	% terhadap Penjualan	Rasio
Penjualan	100	100%	
Dikurangi : Harga Pokok Penjualan	35	35%	
Laba bruto	65	65% ---->	GPM
Dikurangi:			
Beban usaha lainnya	30	30%	
Laba bersih dari operasi	35	35% ---->	OPM
Pendapatan lain-lain	3	3% ---->	pl
Beban lain-lain	(1)	-1% ---->	bl
Pendapatan/beban lain2 - netto	2	2%	
Laba bersih sebelum pajak	37	37% ---->	PPM
Dikurangi: PPh terutang	9	9% ---->	CTTOR
Laba bersih setelah pajak	28	28% ---->	NPM

Rasio-rasio input juga diukur sebagai benchmark karena rasio-rasio tersebut memberikan gambaran mengenai seberapa besar input yang diserap oleh suatu usaha untuk menghasilkan output yang dihasilkannya. Disamping besaran deviasi rasio input wajib pajak terhadap benchmark dapat memberikan indikasi adanya ketidakwajaran dalam pembebanan biaya, nilai rasio input yang ditunjukkan oleh wajib pajak juga memberikan gambaran mengenai potensi withholding tax yang mungkin masih dapat digali. Rasio Pajak Masukan/Penjualan dilakukan

benchmark untuk menilai kewajaran pengkreditan pajak masukan yang dilakukan wajib pajak, disamping memberikan gambaran seberapa besar input perusahaan yang merupakan objek PPN. Keseluruhan rasio yang digunakan dalam total benchmarking dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

Rasio Kinerja Operasional

1. Gross Profit Margin (GPM)

Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap Penjualan. Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual.

2. Operating Profit Margin (OPM)

Operating Profit Margin (OPM) merupakan perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap Penjualan. Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM menunjukkan bahwa perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan.

3. Pretax Profit Margin (PPM)

Pretax Profit Margin (PPM) merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap Penjualan. Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif terhadap nilai penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya.

4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio Pajak Penghasilan terutang terhadap Penjualan. Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi

hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan.

5. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap Penjualan. Nilai NPM menunjukkan besarnya Laba Bersih yang dihasilkan perusahaan setelah

memperhitungkan PPh yang terutang. Makin besar NPM menunjukkan makin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham).

6. Dividend Payout Ratio (DPR)

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio nilai pembayaran dividen terhadap laba bersih. Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai.

Rasio PPN

7. Rasio PPN (pn)

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang. Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut:

$$pn = \frac{\text{Jumlah Pajak Masukan Januari - Desember}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Rasio

8. Rasio Gaji/ Penjualan (g)

Rasio Gaji/ Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap Penjualan. Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, tunjangan dan/atau pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Makin tinggi nilai g menunjukkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.

9. Rasio Bunga/ Penjualan (b)

Rasio Bunga/ Penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap Penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha (other expense).

10. Rasio Sewa/ Penjualan (b)

Rasio Sewa/ Penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap Penjualan

11. Rasio Penyusutan/ Penjualan (py)

Rasio Penyusutan/ Penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap Penjualan.

12. Rasio Input Lainnya (x)

Rasio Input Lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap Penjualan.

Rasio aktivitas luar usaha

13. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)

Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap Penjualan.

14. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)

Rasio Biaya dari luar usaha/Penjualan merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap Penjualan.

2.2.6. Pemanfaatan Rasio Benchmark

Penggunaan rasio-rasio benchmark untuk melakukan pengujian kepatuhan terhadap suatu Wajib Pajak. Panduan yang disajikan ini sekedar merupakan ilustrasi bagaimana rasio-rasio dalam total benchmarking ini dapat dimanfaatkan. Pengguna dapat mengembangkan sendiri cara-cara pemanfaatan yang dianggap lebih tepat dan lebih efisien sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Dalam ilustrasi ini, aspek yang dapat diuji menggunakan benchmark meliputi:

a. Biaya Usaha

Biaya Usaha meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha Lainnya. Istilah yang digunakan maupun cara penggolongan jenis-jenis beban mungkin berbeda-beda tergantung jenis usaha maupun model pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak. Biaya usaha Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan *Benchmark* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Membandingkan rasio HPP/Penjualan terhadap rasio benchmark, dimana rasio HPP/Penjualan = 100% - GPM;

Membandingkan rasio Biaya Usaha Lain/Penjualan terhadap rasio benchmark, dimana rasio Biaya Usaha Lain/Penjualan = GPM – OPM.

Membandingkan hasil penjumlahan rasio HPP/Penjualan dan Biaya Usaha Lain/Penjualan diatas dengan rasio *benchmarknya*.

Melakukan analisis terhadap hasil perbandingan tersebut.

b. Koreksi Fiskal

Dalam menghitung PPh terutang dalam suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengalikan tarif pajak yang berlaku dengan Penghasilan Kena Pajak. Nilai Penghasilan Kena Pajak pada

dasarnya merupakan nilai Laba Komersial Perusahaan yang disesuaikan dengan sejumlah koreksi fiskal baik berupa Koreksi Fiskal Positif maupun Koreksi Fiskal Negatif, serta memperhitungkan sejumlah kompensasi kerugian tahun sebelumnya, jika ada. Rasio-rasio benchmarking dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi fiskal suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark pada usaha sejenis. Kewajaran tersebut dapat dinilai dengan membandingkan antara rasio PPh terutang/Laba bersih Komersial Wajib Pajak dengan benchmarknya, dimana rasio tersebut dapat dihitung dengan cara membagi CTTOR terhadap PPM. Hasil perbandingan tersebut, apabila ternyata rasio WP lebih rendah dibanding benchmark, harus dianalisis secara hati-hati apakah Wajib Pajak yang bersangkutan juga melakukan kompensasi kerugian, sebelum dapat menarik kesimpulan adanya indikasi bahwa Koreksi Fiskal Positif/Negatif yang dilakukan ternyata lebih rendah/tinggi dari yang seharusnya

c. Penghasilan dan Biaya Luar Usaha

Pengujian atas penghasilan dan biaya luar usaha dilakukan dengan membandingkan nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) Wajib Pajak terhadap rasio pl dan bl benchmark. Analisis dilakukan terhadap hasil perbandingan tersebut.

d. Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh

Pengujian dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio yang berkaitan dengan objek Pemotongan dan Pemungutan PPh terhadap benchmarknya. Rasio-rasio yang dibandingkan meliputi rasio Gaji/Penjualan (g) terkait objek PPh pasal 21. Rasio Bunga/Penjualan (b) terkait objek PPh Pasal 23, dan rasio Sewa/Penjualan terkait objek PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2).

e. Kewajaran Pajak Masukan

Pengujian kewajaran Pajak Masukan pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan rasio Pajak Masukan/Penjualan (pn) Wajib Pajak dengan rasio benchmarknya, serta membandingkan penghitungan pembelian bahan berdasarkan laporan keuangan dengan pembelian bahan (barang) berdasarkan pengkreditan pajak masukan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana

adanya atau mengungkap fakta secara lebih mendalam mengenai Total Benchmarking dalam menilai kewajaran laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Sukardi (2009:14) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan kegiatan penelitian. Penelitian deskriptif ini juga disebut penelitian pra eksperimen karena dalam penelitian ini dilakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2009:402) sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Perantara Keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor perantara keuangan yaitu perbankan (bank devisa), asuransi (non jiwa), dan *financial institution* (pembiayaan konsumen) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2005 – 2007.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data laporan keuangan perusahaan sektor perantara keuangan periode 2005-2007 dan data total benchmarking perpajakan tahun 2005 – 2007.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber data tidak langsung oleh peneliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dari ICMD.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses yang dilakukan melalui pencatatan, penyusunan, pengolahan dan penafsiran, serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan cara :

1. Melakukan perhitungan rasio yang meliputi 14 rasio total benchmarking :
 - a. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan;
 - b. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan;

- c. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan;
 - d. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan;
 - e. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan;
 - f. Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak;
 - g. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang;
 - h. Rasio biaya gaji terhadap penjualan;
 - i. Rasio biaya bunga terhadap penjualan;
 - j. Rasio biaya sewa terhadap penjualan;
 - k. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;
 - l. Rasio “input antara” lainnya terhadap penjualan;
 - m. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan
 - n. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan
2. Membandingkan dan menganalisis masing-masing rasio yang ada dengan rasio benchmark.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan di sector perantara keuangan yang meliputi perbankan, asuransi dan pembiayaan customer. Berikut ini perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang terdaftar di ICMD dari tahun 2005 – 2007.

A. Klasifikasi Lapangan Usaha Perbankan

Tabel 4.1
Laporan Keuangan Perusahaan KLU Perbankan

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	Laporan Keuangan		
			2005	2006	2007
1	AGRO	PT Bank Agroniaga Tbk	-	v	v
2	ANKB	PT Bank Arta Niaga Kencana Tbk	v	v	-
3	BABP	PT Bank ICB Bumiputera Tbk (Sebelumnya: PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk)	v	v	v
4	BACA	PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	v	v
5	BAEK	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	v	v	v
6	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	v	v	v

7	BBIA	PT Bank UOB Buana Tbk	v	v	v
8	BBKP	PT Bank Bukopin Tbk	v	v	v
9	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	v	v	-
10	BBNP	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	v	v	v
11	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	v	v	v
12	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-	-
13	BCIC	PT Bank Mutiara Tbk (Sebelumnya: PT Bank Century Tbk)	v	v	v
14	BDMN	PT Bank Danamon Tbk	v	v	v
15	BEKS	PT Bank Pundi Indonesia (Sebelumnya: PT Bank Eksekutif Internasional Tbk)	v	v	v
16	BGIN	PT Bank Global Internasional Tbk	-	-	-
17	BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	-
18	BKSW	PT Bank QNB Kesawan Tbk (Sebelumnya: PT Bank Kesawan Tbk)	v	v	v
19	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	v	v	v
20	BNBA	PT Bank Bumi Arta Tbk	v	v	v
21	BNGA	PT Bank CIMG Niaga Tbk	v	v	v
22	BNII	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	v	v	v
23	BNLI	PT Bank Permata Tbk	v	v	v
24	BSIM	PT Bank Sinarmas Tbk	-	-	-
25	BSWD	PT Bank of India Indonesia Tbk (Sebelumnya: PT Bank Swadesi Tbk)	v	v	v
26	BTPN	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	v	v
27	BVIC	PT Bank Victoria International Tbk	v	v	v
28	INPC	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	v	v	v
29	LPBN	PT Lippo Bank Tbk	v	v	v
30	MAYA	PT Bank Mayapada Tbk	v	v	v
31	MCOR	PT Bank Windu Kentjana International Tbk	-	v	v
32	MEGA	PT Bank Mega Tbk	v	v	v
33	NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk	v	v	v
34	PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk	v	v	v
35	SDRA	PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	v	v	v
Jumlah Data			27	31	29

Dari tabel 4.1 di atas, berdasarkan data yang ada di ICMD terdapat 35 perusahaan asuransi yang merupakan populasi penelitian. Sampel penelitian ini untuk tahun 2005 terdapat 27 perusahaan perbankan, untuk tahun 2006 terdapat 31 perusahaan perbankan dan tahun 2007 terdapat 29 perusahaan perbankan.

B. Klasifikasi Lapangan Usaha Asuransi

Tabel 4.2

Laporan Keuangan Perusahaan KLU Asuransi

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	Laporan Keuangan		
			2005	2006	2007
1	ABDA	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	v	v	v
2	AHAP	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	v	v	v
3	AMAG	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	v	v	v
4	ASBI	PT Asuransi Bintang Tbk	v	v	v
5	ASDM	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	v	v	v
6	ASJT	PT Asuransi Jasa Tania (Persero) Tbk	v	v	v
7	ASRM	PT Asuransi Ramayana Tbk	v	v	v
8	LPGI	PT Lippo General Insurance Tbk	v	v	v
9	MREI	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	-	-	-
10	PNIN	PT Panin Insurance Tbk	v	v	v
11	PNLF	PT Panin Financial Tbk (Sebelumnya: PT Panin Life Tbk)	-	-	-
Jumlah Data			9	9	9

Dari tabel 4.2 di atas, berdasarkan data yang ada di ICMD terdapat 11 perusahaan asuransi yang merupakan populasi penelitian. Sampel penelitian ini untuk tahun 2005 terdapat 9 perusahaan asuransi, untuk tahun 2006 terdapat 9 perusahaan asuransi dan tahun 2007 terdapat 9 perusahaan asuransi.

C. Klasifikasi Lapangan Usaha Pembiayaan Konsumen

Tabel 4.3

Laporan Keuangan Perusahaan KLU Pembiayaan Konsumen

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	Laporan Keuangan		
			2005	2006	2007
1	ADMF	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	v	v	v
2	BBLD	PT Buana Finance Tbk	v	v	v
3	BFIN	PT BFI Finance Indonesia Tbk	v	v	v
4	CFIN	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	v	v	v
5	DEFI	PT Danasupra Erapacific Tbk	v	v	v
6	GSMF	PT Equity Development Investment Tbk	v	v	v
7	INCF	PT Amstelco Indonesia Tbk (Sebelumnya: PT Indo Citra Finance Tbk)	-	-	-
8	MFIN	PT Mandala Multifinance Tbk	-	-	-
9	MITI	PT Mitra Investindo Tbk (Sebelumnya: PT Siwani Trimitra Tbk)	-	-	-
10	MTFN	PT Capitalinc Investment Tbk	-	-	-
11	SMMA	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	v	v	v
12	TRUS	PT Trust Finance Indonesia Tbk	v	v	v
13	VRNA	PT Verena Multi Finance Tbk (Sebelumnya: PT Verana Oto Finance Tbk)	-	-	-
14	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	v	v	v
Jumlah Data			9	9	9

Dari tabel 4.3 di atas, berdasarkan data yang ada di ICMD terdapat 14 perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan populasi penelitian. Sampel penelitian ini untuk tahun 2005 terdapat 9 perusahaan asuransi, untuk tahun 2006 terdapat 9 perusahaan asuransi dan tahun 2007 terdapat 9 perusahaan pembiayaan konsumen.

4.2 Data Benchmarking Perpajakan Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Tabel 4.4
Data Rasio Benchmarking Sektor Perantara Keuangan Tahun 2005

NO	KLU	URAIAN KLU	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	10*pn	g	py	s	b	pl	bl	X
1	65121	Bank Devisa	66,93	32,41	33,46	10,49	22,97	36,92	0,01	18,69	1,99	1,89	18,38	1,19	0,14	12,37
2	65922	Pembiayaan Konsumen	100,00	25,34	28,76	12,00	16,77	0,00	0,13	20,16	0,69	0,49	2,82	8,91	5,49	7,44
3	66030	Asuransi	45,57	16,96	25,56	7,76	17,80	27,58	0,00	14,69	2,43	2,94	0,00	8,67	0,06	22,53

Tabel 4.5
Data Rasio Benchmarking Sektor Perantara Keuangan Tahun 2006

NO	KLU	URAIAN KLU	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	10*pn	g	py	s	b	pl	bl	X
1	65121	Bank Devisa	64,13	28,61	28,95	9,03	19,92	39,2	0	17,17	1,86	1,82	19,21	0,5	0,15	13,75
2	65922	Pembiayaan Konsumen	100	47,26	31,23	12,26	18,97	0	0,01	12,63	2,17	1,53	6,72	0,44	16,47	28,19
3	66030	Asuransi	45,57	16,96	25,56	7,76	17,8	27,58	0	14,69	2,43	2,94	0	8,67	0,06	22,53

Tabel 4.6
Data Rasio Benchmarking Sektor Perantara Keuangan Tahun 2007

NO	KLU	URAIAN KLU	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	10*pn	g	py	s	b	pl	bl	X
1	65121	Bank Devisa	63,87	29,02	29,51	11,12	18,4	24,57	0,01	16,67	2,03	1,82	11,91	0,69	0,23	29,76
2	65922	Pembiayaan Konsumen	100	47,26	31,23	12,26	18,97	0	0,01	12,63	2,17	1,53	6,72	0,44	16,47	28,19
3	66030	Asuransi	45,57	16,96	25,56	7,76	17,8	27,58	0	14,69	2,43	2,94	0	8,67	0,06	22,53

Sumber : SE-11/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap II dan SE-68/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap III

GPM	: Gross Profit Margin	py	: Rasio Biaya Penyusutan terhadap Penjualan
OPM	: Operating Profit Margin	s	: Rasio Biaya Sewa terhadap Penjualan
PPM	: Pre-tax Profit Margin	b	: Rasio Biaya Bunga terhadap Penjualan
CTTOR	: Corporate Tax to Turn Over Ratio	pl	: Rasio Penghasilan Luar Usaha terhadap Penjualan
NPM	: Net Profit Margin	bl	: Rasio Biaya Luar usaha terhadap Penjualan
DPR	: Dividend Payout Ratio	x	: Rasio Input Lainnya terhadap Penjualan
pn	: Rasio Pajak Masukan terhadap Penjualan	g	: Rasio Biaya Gaji terhadap Penjualan

4.3 Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan rasio-rasio benchmark untuk melakukan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak. Aspek yang dapat diuji menggunakan benchmark meliputi:

- a. Biaya Usaha
- b. Koreksi Fiskal
- c. Penghasilan dan Biaya Luar Usaha
- d. Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh
- e. Kewajaran Pajak Masukan

Dari kelima aspek di atas, untuk poin e kewajaran pajak masukan tidak dapat dilakukan pengujian karena sektor perantara keuangan ini merupakan sektor yang dikecualikan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4.4 Perhitungan Rasio Benchmarking Perusahaan Perbankan

Tabel 4.7
Rasio Benchmarking Perbankan Tahun 2005

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	ANKB	39,53%	13,16%	14,22%	4,45%	9,90%	31,80%	0,00%	13,92%	64,18%
2	INPC	49,34%	2,55%	3,27%	0,60%	2,35%	0,00%	0,00%	16,44%	56,60%
3	BBKP	54,53%	17,79%	18,07%	6,96%	12,36%	41,00%	0,00%	13,53%	50,73%
4	BNBA	64,70%	21,42%	23,49%	7,19%	16,30%	30,01%	0,00%	20,87%	42,59%
5	BBCA	74,42%	37,87%	38,77%	11,22%	27,22%	44,51%	0,00%	16,02%	42,08%
6	BNGA	57,07%	19,57%	20,10%	5,39%	14,70%	31,46%	0,00%	10,81%	53,22%

7	BDMN	67,59%	37,24%	34,10%	9,96%	24,14%	18,92%	0,00%	19,23%	40,10%
8	BAEK	45,50%	21,32%	21,32%	6,61%	14,71%	0,00%	0,00%	12,15%	56,53%
9	SDRA	65,91%	10,40%	9,86%	3,53%	6,58%	0,00%	0,00%	21,77%	63,88%
10	BABP	44,75%	16,75%	15,10%	3,96%	11,14%	16,42%	0,00%	13,57%	59,43%
11	BNII	70,69%	19,29%	19,72%	0,98%	16,19%	32,72%	0,00%	19,13%	49,37%
12	BMRI	53,71%	5,66%	5,87%	2,38%	2,87%	457,30%	0,00%	15,18%	55,94%
13	MAYA	40,66%	7,58%	7,54%	2,50%	5,36%	0,00%	0,00%	13,88%	62,49%
14	MEGA	35,25%	11,56%	11,50%	3,76%	7,82%	71,30%	0,00%	9,17%	32,17%
15	BCIC	143,45%	42,00%	3,98%	0,21%	3,78%	0,00%	0,00%	14,29%	112,20%
16	BBNI	72,58%	17,23%	17,90%	6,64%	11,23%	110,85%	0,00%	20,93%	43,29%
17	BBNP	39,75%	17,00%	16,82%	5,07%	11,74%	35,22%	0,00%	9,26%	61,18%
18	NISP	48,59%	15,37%	15,26%	4,40%	10,86%	0,00%	0,00%	13,30%	60,25%
19	BSWD	49,50%	6,66%	19,96%	5,98%	13,64%	0,00%	0,00%	16,66%	57,16%
20	PNBN	52,53%	25,57%	25,48%	6,57%	17,18%	88,80%	0,00%	7,01%	59,70%
21	BNLI	59,35%	11,74%	11,93%	0,75%	8,68%	0,00%	0,00%	19,93%	51,27%
22	BEKS	44,10%	38,19%	32,39%	9,35%	23,05%	0,00%	0,00%	8,15%	59,18%
23	BKSW	37,35%	2,02%	2,87%	1,26%	1,79%	0,00%	0,00%	14,85%	69,34%
24	BBRI	77,74%	30,79%	32,50%	10,60%	22,07%	52,01%	0,00%	25,54%	27,71%
25	BBIA	62,75%	27,23%	29,40%	9,13%	20,66%	24,61%	0,00%	19,65%	44,52%

26	BVIC	38,86%	13,04%	12,81%	3,67%	9,36%	0,00%	0,00%	5,12%	67,24%
27	LPBN	80,59%	27,89%	24,19%	4,55%	19,09%	0,00%	0,00%	25,56%	43,42%
MEAN		58,18%	13,20%	14,57%	5,10%	10,24%	39,04%	0,00%	15,40%	55,03%

Berdasarkan tabel 4.7, maka rata-rata GPM untuk perbankan tahun 2005 untuk GPM sebesar 58,18%, OPM sebesar 13,20%, PPM sebesar 14,57%, CTTOR sebesar 5,10%, NPM sebesar 10,24%, DPR sebesar 39,04%, PPN sebesar 0,00%, Rasio Biaya gaji sebesar 15,40%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 55,03%. Untuk PPN, untuk jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga nilainya sebesar 0,00%.

Tabel 4.8
Rasio Benchmarking Perbankan Tahun 2005 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PNGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	ANKB	2,16%	3,11%	7,17%	1,26%	0,21%
2	INPC	2,26%	1,07%	28,54%	0,77%	0,05%
3	BBKP	1,99%	1,63%	17,89%	0,64%	0,37%
4	BNBA	0,55%	3,47%	16,02%	2,04%	0,03%
5	BBCA	2,75%	2,19%	12,89%	0,91%	0,00%
6	BNGA	0,68%	0,81%	25,18%	0,53%	0,00%
7	BDMN	1,88%	2,26%	6,99%	2,54%	5,68%
8	BAEK	1,93%	1,67%	8,43%	0,05%	0,06%
9	SDRA	4,07%	1,46%	23,05%	0,09%	0,67%
10	BABP	12,54%	2,93%	40,77%	2,08%	0,44%
11	BNII	4,34%	2,85%	25,09%	0,00%	0,00%
12	BMRI	2,13%	2,66%	12,75%	0,37%	0,15%
13	MAYA	0,47%	5,28%	13,45%	0,05%	0,08%

14	MEGA	0,92%	1,90%	9,87%	0,41%	0,47%
15	BCIC	2,56%	0,00%	43,09%	46,47%	0,48%
16	BBNI	2,33%	6,26%	15,87%	0,67%	0,00%
17	BBNP	2,37%	1,13%	9,99%	0,01%	0,19%
18	NISP	1,85%	1,44%	16,62%	0,01%	0,13%
19	BSWD	0,00%	0,00%	17,01%	1,28%	0,04%
20	PNBN	0,65%	3,29%	18,96%	0,35%	0,44%
21	BNLI	3,71%	0,00%	26,01%	1,53%	1,34%
22	BEKS	0,41%	3,00%	27,06%	25,21%	19,42%
23	BKSW	3,13%	2,13%	16,46%	0,86%	0,00%
24	BBRI	1,59%	2,33%	15,17%	1,71%	0,00%
25	BBIA	0,73%	2,87%	7,71%	2,18%	0,00%
26	BVIC	1,17%	1,44%	16,46%	0,24%	0,46%
27	LPBN	4,74%	5,01%	17,62%	1,51%	5,20%
MEAN		2,37%	2,30%	18,37%	3,47%	1,33%

Berdasarkan tabel 4.8, maka rata-rata untuk perbankan tahun 2005 untuk rasio Biaya Sewa sebesar 2,37%, Biaya Penyusutan sebesar 2,30%, Input lainnya sebesar 18,37%, Penghasilan Luar Usahasebesar 3,47%, Biaya Luar Usaha sebesar 1,33%,

Tabel 4.9
Rasio Benchmarking Perbankan Tahun 2006

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	AGRO	25,31%	3,59%	-3,74%	0,00%	-2,80%	0,00%	0,00%	8,60%	76,13%
2	ANKB	32,93%	10,31%	10,77%	3,79%	7,50%	31,68%	0,00%	11,50%	70,01%
3	INPC	37,43%	3,11%	3,29%	1,03%	2,42%	0,00%	0,00%	12,63%	71,31%

4	BBKP	45,59%	14,04%	15,02%	3,87%	10,29%	36,64%	0,00%	11,14%	60,13%
5	BNBA	56,40%	20,58%	21,72%	7,15%	14,56%	411,01%	0,00%	17,71%	48,33%
6	BACA	76,39%	29,13%	27,37%	0,00%	25,25%	0,00%	0,00%	16,94%	61,80%
7	BBCA	6,83%	3,50%	3,54%	1,12%	2,47%	42,06%	0,00%	1,47%	4,47%
8	BNGA	54,57%	19,32%	17,51%	5,34%	12,17%	21,65%	0,00%	10,73%	58,27%
9	BDMN	61,99%	21,82%	18,00%	5,58%	12,42%	73,16%	0,00%	16,16%	44,94%
10	BAEK	34,71%	14,60%	14,54%	4,52%	10,02%	0,00%	0,00%	9,32%	67,48%
11	SDRA	54,62%	13,30%	12,21%	3,86%	8,34%	0,00%	0,00%	18,61%	48,78%
12	BABP	41,31%	1,53%	1,92%	0,71%	1,92%	0,00%	0,00%	11,45%	62,44%
13	BNII	58,80%	11,61%	11,99%	0,21%	10,22%	40,05%	0,00%	12,40%	57,42%
14	BMRI	48,86%	10,32%	9,22%	6,38%	9,22%	12,96%	0,00%	11,49%	60,08%
15	MAYA	34,72%	11,27%	10,96%	3,71%	7,49%	0,00%	0,00%	10,17%	67,65%
16	MEGA	28,41%	7,50%	7,31%	2,42%	4,99%	0,00%	0,00%	8,51%	75,46%
17	BCIC	42,83%	1,10%	3,78%	1,12%	2,66%	0,00%	0,00%	7,59%	77,80%
18	BBNI	68,53%	17,77%	19,01%	6,10%	12,89%	38,64%	0,00%	19,48%	50,44%
19	BBNP	34,82%	12,38%	12,34%	3,73%	8,61%	0,00%	0,00%	7,47%	69,92%
20	NISP	44,13%	13,03%	13,10%	3,77%	9,33%	0,00%	0,00%	13,79%	62,97%
21	BSWD	33,91%	10,09%	10,17%	2,83%	7,16%	48,72%	0,00%	13,53%	69,29%
22	PNBN	59,62%	27,29%	26,72%	8,13%	16,71%	1,65%	0,00%	6,79%	58,25%

23	BNLI	55,37%	11,35%	8,83%	2,36%	6,79%	0,00%	0,00%	16,07%	56,60%
24	BEKS	24,40%	26,71%	10,03%	2,85%	-7,18%	0,00%	0,00%	9,50%	78,02%
25	BKSW	33,59%	2,55%	2,89%	0,83%	1,92%	0,00%	0,00%	13,51%	73,38%
26	BBRI	27,45%	28,03%	28,03%	8,69%	20,21%	48,31%	0,00%	22,93%	72,61%
27	BTPN	79,55%	25,24%	22,82%	9,18%	14,67%	0,00%	0,00%	23,83%	45,51%
28	BBIA	59,48%	27,15%	26,89%	8,46%	18,74%	25,36%	0,00%	17,52%	46,25%
29	BVIC	26,02%	14,53%	13,98%	3,34%	10,89%	0,00%	0,00%	4,41%	80,08%
30	MCOR	49,96%	6,27%	3,71%	4,42%	2,59%	0,00%	0,00%	10,18%	54,34%
31	LPBN	79,63%	30,53%	19,65%	4,78%	17,18%	0,00%	0,00%	22,17%	44,16%
MEAN		45,75%	12,78%	12,37%	3,88%	9,02%	26,83%	0,00%	12,83%	60,46%

Berdasarkan tabel 4.9, maka rata-rata GPM untuk perbankan tahun 2006 untuk GPM sebesar 45,75%, OPM sebesar 12,78%, PPM sebesar 12,37%, CTTOR sebesar 3,88%, NPM sebesar 9,02%, DPR sebesar 26,83%, PPN sebesar 0%, Rasio Biaya gaji sebesar 12,83%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 60,46%. Untuk PPN, untuk jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga nilainya sebesar 0%.

Tabel 4.10
Rasio Benchmarking Perbankan Tahun 2006 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PENGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	AGRO	2,95%	1,53%	15,81%	0,01%	0,16%
2	ANKB	1,79%	2,43%	6,90%	1,00%	0,53%
3	INPC	1,46%	1,83%	16,44%	0,21%	0,02%
4	BBKP	1,74%	1,66%	11,96%	1,07%	0,09%

5	BNBA	0,57%	2,85%	13,33%	1,13%	0,03%
6	BACA	0,00%	0,00%	15,53%	0,02%	1,78%
7	BBCA	0,27%	0,21%	1,03%	0,03%	0,00%
8	BNGA	0,52%	0,59%	23,41%	0,00%	1,81%
9	BDMN	1,46%	2,06%	20,50%	1,29%	5,11%
10	BAEK	1,45%	1,39%	7,95%	0,07%	0,14%
11	SDRA	3,35%	1,40%	15,53%	0,09%	1,18%
12	BABP	10,91%	2,28%	19,40%	0,81%	0,41%
13	BNII	2,84%	2,34%	29,02%	0,00%	0,00%
14	BMRI	1,72%	2,32%	10,60%	0,52%	0,06%
15	MAYA	0,47%	3,71%	9,11%	0,02%	0,33%
16	MEGA	0,66%	2,49%	7,59%	0,49%	0,69%
17	BCIC	1,09%	1,15%	33,06%	2,90%	0,22%
18	BBNI	2,19%	7,54%	12,72%	1,24%	0,00%
19	BBNP	2,06%	0,87%	12,04%	0,06%	0,10%
20	NISP	2,22%	1,53%	13,55%	0,20%	0,13%
21	BSWD	0,01%	2,18%	10,28%	0,12%	0,04%
22	PNBN	0,59%	3,81%	16,41%	0,27%	0,84%
23	BNLI	3,27%	0,00%	20,54%	0,57%	2,00%
24	BEKS	0,41%	3,64%	24,85%	22,55%	5,87%
25	BKSW	1,88%	2,49%	11,86%	0,34%	0,45%
26	BBRI	1,53%	1,90%	10,03%	0,58%	0,00%
27	BTPN	2,30%	1,83%	14,04%	0,56%	2,99%
28	BBIA	0,62%	2,22%	8,93%	0,09%	0,35%
29	BVIC	0,94%	1,12%	4,82%	0,04%	0,60%
30	MCOR	0,91%	2,42%	30,16%	0,29%	2,56%
31	LPBN	3,53%	4,53%	17,68%	0,29%	11,17%
MEAN		1,80%	2,14%	15,00%	1,19%	1,28%

Berdasarkan tabel 4.10, maka rata-rata untuk perbankan tahun 2006 untuk Rasio Biaya Sewa sebesar 1,80%, Biaya Penyusutan sebesar 2,14%, Input lainnya sebesar 15,00%, Penghasilan Luar Usahasebesar 1,19%, dan Biaya Luar Usaha sebesar 1,28%,

Tabel 4.11
Rasio Benchmarking Perbankan Tahun 2007

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	AGRO	32,78%	3,53%	3,33%	1,18%	1,33%	0,00%	0,00%	9,34%	68,42%
2	INPC	43,23%	2,80%	2,87%	1,30%	1,38%	0,05%	0,00%	18,05%	65,72%
3	BBKP	48,52%	16,47%	16,96%	5,52%	11,70%	33,61%	0,00%	13,04%	60,01%
4	BNBA	56,21%	16,05%	16,47%	4,99%	11,48%	33,31%	0,00%	20,12%	46,89%
5	BACA	45,06%	21,37%	21,33%	5,47%	14,88%	0,00%	0,00%	9,90%	63,43%
6	BBCA	76,10%	38,78%	39,21%	11,87%	27,50%	46,51%	0,00%	17,58%	41,33%
7	BNGA	61,94%	19,64%	20,32%	5,07%	15,25%	47,61%	0,00%	12,99%	51,27%
8	BDMN	65,62%	26,75%	24,60%	7,75%	16,85%	31,74%	0,00%	17,94%	36,46%
9	BAEK	46,51%	21,00%	20,89%	6,42%	14,48%	0,00%	0,00%	11,50%	58,94%
10	SDRA	65,65%	21,39%	21,18%	6,61%	14,65%	0,00%	0,00%	19,21%	36,45%
11	BABP	56,35%	4,74%	4,52%	1,67%	2,85%	9,69%	0,00%	13,44%	50,44%
12	BNII	66,79%	5,77%	6,80%	1,67%	7,30%	62,63%	0,00%	18,13%	54,46%
13	BMRI	66,64%	25,96%	26,47%	11,23%	18,16%	35,77%	0,00%	17,06%	46,57%
14	MAYA	46,81%	11,80%	11,85%	4,13%	8,19%	0,00%	0,00%	13,60%	55,48%
15	MEGA	48,92%	22,31%	22,31%	6,94%	15,57%	0,00%	0,00%	10,17%	58,41%
16	BCIC	51,86%	7,84%	4,36%	0,00%	4,88%	0,00%	0,00%	10,65%	66,28%
17	BBNP	39,53%	13,88%	13,69%	4,16%	9,53%	0,00%	0,00%	9,59%	65,82%
18	NISP	57,71%	13,32%	13,41%	3,88%	9,53%	0,00%	0,00%	18,66%	55,08%
19	BSWD	37,92%	10,79%	11,83%	3,71%	8,12%	0,00%	0,00%	16,54%	66,00%
20	PNBN	65,67%	31,23%	30,10%	11,83%	19,60%	0,77%	0,00%	7,66%	48,13%
21	BNLI	81,33%	19,06%	17,99%	7,57%	12,18%	0,00%	0,00%	23,97%	43,92%

22	BEKS	47,49%	14,88%	0,98%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0,57%	55,90%
23	BKSW	43,76%	5,25%	3,17%	2,13%	2,75%	0,00%	0,00%	15,26%	63,91%
24	BBRI	79,68%	32,51%	33,48%	14,25%	20,82%	47,52%	0,00%	22,69%	28,16%
25	BTPN	84,81%	32,49%	31,19%	15,10%	20,09%	0,00%	0,00%	24,64%	37,51%
26	BBIA	70,76%	32,84%	32,90%	9,69%	22,88%	29,21%	0,00%	24,17%	37,08%
27	BVIC	41,33%	16,47%	16,46%	3,21%	14,07%	0,00%	0,00%	5,34%	77,27%
28	MCOR	61,91%	35,49%	15,83%	3,75%	11,08%	0,00%	0,00%	10,43%	53,88%
29	LPBN	80,57%	33,55%	31,75%	9,06%	22,16%	0,00%	0,00%	21,77%	44,06%
MEAN		57,64%	19,24%	17,80%	5,87%	12,40%	13,05%	0,00%	14,97%	53,01%

Berdasarkan tabel 4.11, maka rata-rata GPM untuk perbankan tahun 2007 untuk GPM sebesar 57,64%, OPM sebesar 19,24%, PPM sebesar 17,80%, CTTOR sebesar 5,87%, NPM sebesar 12,40%, DPR sebesar 13,05%, PPN sebesar 0%, Rasio Biaya gaji sebesar 14,97%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 53,01%. Untuk PPN, untuk jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga nilainya sebesar 0%.

Tabel 4.12
Rasio Benchmarking Perbankan Tahun 2007 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PNGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	AGRO	3,25%	1,64%	15,02%	0,00%	0,20%
2	INPC	1,90%	1,57%	18,30%	0,07%	0,03%
3	BBKP	0,00%	0,00%	14,56%	0,48%	0,00%
4	BNBA	0,67%	3,79%	14,05%	0,15%	0,05%
5	BACA	1,64%	3,85%	8,30%	0,00%	0,04%
6	BBCA	3,28%	2,35%	12,83%	0,43%	0,00%
7	BNGA	0,61%	0,59%	28,11%	0,68%	0,00%
8	BDMN	0,00%	0,00%	18,83%	1,80%	3,96%

9	BAEK	1,83%	1,63%	10,56%	0,10%	0,10%
10	SDRA	2,67%	0,00%	15,42%	0,21%	0,21%
11	BABP	3,15%	1,78%	22,70%	0,22%	0,23%
12	BNII	3,14%	2,81%	36,20%	1,03%	0,00%
13	BMRI	1,95%	2,44%	12,85%	0,50%	0,00%
14	MAYA	1,79%	4,41%	15,21%	0,05%	0,00%
15	MEGA	0,00%	0,00%	10,13%	0,45%	0,45%
16	BCIC	1,36%	1,77%	30,23%	0,72%	4,22%
17	BBNP	0,00%	0,00%	12,46%	0,02%	0,21%
18	NISP	3,08%	2,41%	20,25%	0,15%	0,06%
19	BSWD	0,09%	2,27%	9,33%	1,05%	0,00%
20	PNBN	0,59%	4,32%	17,87%	0,33%	1,46%
21	BNLI	0,00%	0,00%	25,18%	1,07%	1,07%
22	BEKS	0,42%	4,54%	24,26%	0,00%	6,46%
23	BKSW	1,34%	2,03%	19,88%	2,08%	2,08%
24	BBRI	0,00%	0,00%	12,72%	0,96%	0,00%
25	BTPN	15,71%	2,10%	13,87%	0,11%	1,41%
26	BBIA	0,84%	2,45%	5,39%	0,10%	0,04%
27	BVIC	0,00%	0,00%	10,45%	0,02%	0,02%
28	MCOR	1,31%	2,73%	11,95%	19,66%	19,66%
29	LPBN	3,03%	4,06%	16,12%	1,80%	1,80%
MEAN		1,85%	1,92%	16,66%	1,18%	1,51%

Berdasarkan tabel 4.12, maka rata-rata untuk perbankan tahun 2007 untuk Rasio Biaya Sewa sebesar 1,85%, Biaya Penyusutan sebesar 1,92%, Input lainnya sebesar 16,66%, Penghasilan Luar Usaha sebesar 1,18%, dan Biaya Luar Usaha sebesar 1,51%,

4.5 Perhitungan Rasio Benchmarking Perusahaan Asuransi

Tabel 4.13
Rasio Benchmarking Asuransi Tahun 2005

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	ABDA	13,75%	-7,92%	-7,92%	0,00%	-5,46%	0,00%	0,00%	12,48%	86,25%
2	ASBI	35,59%	-1,42%	2,32%	0,03%	3,35%	50,22%	0,00%	19,29%	64,41%
3	ASDM	60,87%	8,55%	11,88%	0,81%	10,26%	56,10%	0,00%	28,07%	39,13%
4	AHAP	41,62%	7,23%	10,05%	1,27%	9,39%	10,06%	0,00%	18,94%	58,38%
5	ASJT	52,03%	11,37%	13,71%	3,62%	9,92%	61,44%	0,00%	16,31%	47,97%
6	AMAG	24,28%	8,90%	9,46%	0,45%	9,03%	94,21%	0,00%	8,65%	75,72%
7	ASRM	47,32%	11,37%	13,90%	4,20%	9,99%	38,12%	0,00%	21,64%	52,68%
8	LPGI	33,71%	15,15%	15,45%	0,00%	15,13%	17,79%	0,00%	8,56%	66,29%
9	PNLF	25,64%	28,85%	21,86%	0,00%	23,15%	91,35%	0,00%	2,10%	74,36%
MEAN		37,20%	9,12%	10,08%	1,15%	9,42%	46,59%	0,00%	15,12%	62,80%

Berdasarkan tabel 4.13, maka rata-rata GPM untuk asuransi tahun 2005 untuk GPM sebesar 37,20%, OPM sebesar 9,12%, PPM sebesar 10,08%, CTTOR sebesar 1,15%, NPM sebesar 9,42%, DPR sebesar 46,59%, PPN sebesar 0%, Rasio Biaya gaji sebesar 15,12%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 62,80%. Untuk PPN, untuk jasa asuransi berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga nilainya sebesar 0%.

Tabel 4.14
Rasio Benchmarking Asuransi Tahun 2005 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PNGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	ABDA	0,00%	2,07%	8,46%	1,34%	0,00%
2	ASBI	0,96%	0,32%	16,44%	3,73%	0,00%

3	ASDM	0,00%	4,32%	19,71%	3,33%	0,00%
4	AHAP	1,20%	2,90%	11,36%	2,83%	0,00%
5	ASJT	0,00%	2,18%	2,21%	2,35%	0,09%
6	AMAG	1,66%	0,45%	4,62%	0,56%	0,11%
7	ASRM	0,00%	1,86%	12,65%	2,53%	1,18%
8	LPGI	1,47%	1,15%	7,38%	0,30%	0,06%
9	PNLF	0,19%	0,14%	1,61%	0,31%	0,00%
MEAN		0,61%	1,71%	9,38%	1,92%	0,16%

Berdasarkan tabel 4.14, maka rata-rata untuk asuransi tahun 2005 untuk Rasio Biaya Sewa sebesar 0,61%, Biaya Penyusutan sebesar 1,71%, Input lainnya sebesar 9,38%, Penghasilan Luar Usaha sebesar 1,92%, dan Biaya Luar Usaha sebesar 0,16%,

Tabel 4.15
Rasio Benchmarking Asuransi Tahun 2006

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	ABDA	25,41%	-0,04%	1,36%	0,00%	1,11%	0,00%	0,00%	14,01%	74,59%
2	ASBI	33,67%	-0,68%	-0,53%	0,03%	1,20%	124,96%	0,00%	19,57%	66,33%
3	ASDM	70,76%	0,87%	1,52%	0,63%	2,37%	154,09%	0,00%	19,40%	29,24%
4	AHAP	37,02%	5,88%	6,82%	1,00%	6,46%	35,70%	0,00%	16,45%	62,98%
5	ASJT	45,95%	8,59%	8,30%	1,74%	7,29%	0,05%	0,00%	14,94%	54,05%
6	AMAG	24,01%	9,31%	10,42%	0,09%	9,85%	0,00%	0,00%	9,15%	75,99%
7	ASRM	39,35%	9,25%	9,67%	1,79%	8,11%	40,64%	0,00%	18,70%	60,65%
8	LPGI	23,97%	1,83%	3,05%	0,00%	1,38%	190,97%	0,00%	9,89%	76,03%
9	PNLF	22,08%	19,79%	20,16%	0,00%	19,93%	0,00%	0,00%	1,16%	77,92%
MEAN		35,80%	6,09%	6,75%	0,59%	6,41%	60,71%	0,00%	13,70%	64,20%

Berdasarkan tabel 4.15, maka rata-rata GPM untuk asuransi tahun 2005 untuk GPM sebesar 35,80%, OPM sebesar 6,09%, PPM sebesar 6,75%, CTTOR sebesar 0,59%, NPM sebesar 6,41%, DPR sebesar 60,71%, PPN sebesar 0%, Rasio Biaya gaji sebesar 13,70%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 64,20%. Untuk PPN, untuk jasa asuransi berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga nilainya sebesar 0%.

Tabel 4.16
Rasio Benchmarking Asuransi Tahun 2006 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PNGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	ABDA	0,00%	2,41%	9,03%	1,40%	0,21%
2	ASBI	0,44%	2,83%	11,50%	0,13%	0,00%
3	ASDM	0,00%	2,45%	9,72%	0,64%	1,20%
4	AHAP	1,19%	2,36%	11,14%	0,94%	0,65%
5	ASJT	0,00%	1,69%	20,72%	0,57%	1,11%
6	AMAG	1,51%	0,61%	3,44%	1,11%	0,07%
7	ASRM	0,00%	1,47%	9,93%	0,41%	1,26%
8	LPGI	1,49%	1,32%	9,44%	1,22%	0,00%
9	PNLF	0,11%	0,11%	0,85%	0,37%	0,00%
MEAN		0,53%	1,69%	9,53%	0,76%	0,50%

Berdasarkan tabel 4.16, maka rata-rata untuk asuransi tahun 2006 untuk Rasio Biaya Sewa sebesar 0,53%, Biaya Penyusutan sebesar 1,69%, Input lainnya sebesar 9,53%, Penghasilan Luar Usahasebesar 0,76%, dan Biaya Luar Usaha sebesar 0,50%,

Tabel 4.17
Rasio Benchmarking Asuransi Tahun 2007

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	ABDA	38,61%	10,87%	12,59%	0,00%	7,42%	0,00%	0,00%	16,67%	61,39%
2	ASBI	11,55%	20,82%	19,01%	0,03%	10,97%	7,08%	0,00%	18,18%	88,45%
3	ASDM	46,51%	-2,64%	1,51%	1,00%	3,61%	0,00%	0,00%	31,44%	53,49%
4	AHAP	27,37%	0,13%	2,22%	0,00%	3,00%	58,86%	0,00%	12,61%	72,63%
5	ASJT	35,98%	13,72%	12,21%	0,00%	9,28%	52,59%	0,00%	20,73%	64,02%
6	AMAG	25,41%	8,99%	9,61%	1,54%	9,49%	0,00%	0,00%	9,39%	74,59%
7	ASRM	34,88%	7,59%	8,60%	1,71%	6,89%	41,03%	0,00%	15,79%	65,12%
8	LPGI	28,57%	8,69%	9,41%	0,00%	8,73%	0,00%	0,00%	9,08%	71,43%
9	PNLF	24,02%	22,10%	22,17%	0,00%	21,60%	0,00%	0,00%	0,97%	75,98%
MEAN		30,32%	2,35%	6,59%	0,47%	4,50%	51,09%	0,00%	14,98%	69,68%

Berdasarkan tabel 4.17, maka rata-rata GPM untuk asuransi tahun 2007 untuk GPM sebesar 30,32%, OPM sebesar 2,35%, PPM sebesar 6,59%, CTTOR sebesar 0,47%, NPM sebesar 4,50%, DPR sebesar 51,09%, PPN sebesar 0%, Rasio Biaya gaji sebesar 14,98%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 69,68%. Untuk PPN, untuk jasa asuransi berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga nilainya sebesar 0%.

Tabel 4.18
Rasio Benchmarking Asuransi Tahun 2007 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PNGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	ABDA	0,00%	2,16%	8,91%	1,71%	0,00%
2	ASBI	0,87%	2,79%	10,57%	1,78%	0,00%
3	ASDM	0,00%	3,25%	14,24%	4,16%	0,00%
4	AHAP	1,30%	2,07%	11,27%	2,09%	0,00%

5	ASJT	0,00%	1,89%	27,07%	0,19%	0,00%
6	AMAG	1,01%	0,62%	5,40%	0,62%	0,05%
7	ASRM	0,00%	1,74%	9,76%	1,01%	0,47%
8	LPGI	1,34%	1,11%	8,35%	0,72%	0,00%
9	PNLF	0,09%	0,05%	0,76%	0,06%	0,00%
MEAN		0,51%	1,74%	10,70%	1,37%	0,06%

Berdasarkan tabel 4.18, maka rata-rata untuk asuransi tahun 2007 untuk Rasio Biaya Sewa sebesar 0,51%, Biaya Penyusutan sebesar 1,74%, Input lainnya sebesar 10,70%, Penghasilan Luar Usaha sebesar 1,37%, dan Biaya Luar Usaha sebesar 0,06%.

5.6 Perhitungan Rasio Benchmarking Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Tabel 4.19
Rasio Benchmarking Pembiayaan Konsumen Tahun 2005

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	ADMF	100,00%	54,49%	37,95%	9,21%	26,75%	62,56%	0,00%	20,12%	24,83%
2	BFIN	100,00%	58,20%	55,90%	17,56%	31,31%	8,95%	0,00%	23,30%	12,69%
3	BBLD	100,00%	70,30%	70,79%	17,94%	49,69%	0,00%	0,00%	12,01%	4,64%
4	CFIN	100,00%	77,44%	49,64%	15,34%	35,60%	0,00%	0,00%	5,64%	32,77%
5	DEFI	100,00%	9,63%	6,83%	3,24%	4,50%	196,72%	0,00%	29,26%	24,18%
6	GSMF	100,00%	-6,98%	6,44%	0,24%	4,97%	5,41%	0,03%	14,75%	0,14%
7	SMMA	100,00%	11,79%	12,70%	0,70%	9,80%	0,00%	0,03%	7,25%	1,60%
8	TRUS	100,00%	71,13%	31,94%	9,54%	22,41%	40,94%	0,07%	10,15%	39,50%
9	WOMF	100,00%	55,27%	28,84%	5,60%	20,21%	0,00%	0,00%	9,61%	38,23%
MEAN		100,00%	44,59%	33,45%	8,82%	22,80%	34,95%	0,01%	14,68%	19,84%

Berdasarkan tabel 4.19, maka rata-rata GPM untuk pembiayaan konsumen tahun 2005 untuk GPM sebesar 100%, OPM sebesar 44,59%, PPM sebesar 33,45%, CTTOR sebesar 8,82%, NPM sebesar 22,80%, DPR sebesar 34,95%, PPN sebesar 0,01%, Rasio Biaya gaji sebesar 14,68%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 19,84%.

Tabel 4.20
Rasio Benchmarking Pembiayaan Konsumen Tahun 2005 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PNGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	ADMF	1,56%	1,18%	12,25%	0,97%	3,07%
2	BFIN	0,88%	1,96%	12,44%	10,88%	13,17%
3	BBLD	1,95%	1,15%	9,95%	6,62%	0,18%
4	CFIN	0,75%	3,75%	12,42%	5,52%	0,54%
5	DEFI	6,82%	5,11%	25,00%	0,00%	0,00%
6	GSMF	1,33%	1,96%	13,81%	3,86%	0,07%
7	SMMA	0,56%	1,90%	10,10%	0,99%	1,71%
8	TRUS	1,49%	7,55%	9,23%	0,31%	0,45%
9	WOMF	1,34%	1,48%	32,68%	12,98%	0,80%
MEAN		1,85%	2,89%	15,32%	4,68%	2,22%

Berdasarkan tabel 4.20, maka rata-rata untuk pembiayaan konsumen tahun 2005 untuk Rasio Biaya Sewa sebesar 1,85%, Biaya Penyusutan sebesar 2,89%, Input lainnya sebesar 15,32%, Penghasilan Luar Usahasebesar 4,68%, dan Biaya Luar Usaha sebesar 2,22%.

Tabel4.21
Rasio Benchmarking Pembiayaan Konsumen Tahun 2006

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	ADMF	100,00%	57,44%	34,29%	8,91%	24,09%	51,30%	0,00%	21,05%	30,63%
2	BFIN	100,00%	56,76%	59,77%	17,98%	47,81%	16,09%	0,00%	23,71%	9,17%
3	BBLD	100,00%	53,11%	68,73%	19,68%	48,11%	10,14%	0,00%	16,49%	

										9,64%
4	CFIN	100,00%	115,76%	47,81%	14,11%	34,65%	0,00%	0,00%	10,65%	29,04%
5	DEFI	100,00%	1,64%	2,60%	0,84%	1,82%	523,35%	0,00%	36,31%	22,38%
6	GSMF	100,00%	-0,02%	4,25%	0,44%	3,83%	6,12%	0,05%	13,77%	0,08%
7	SMMA	100,00%	8,31%	8,84%	0,43%	6,87%	0,00%	0,02%	4,83%	2,61%
8	TRUS	100,00%	64,89%	28,56%	8,47%	20,09%	0,00%	0,09%	13,83%	36,86%
9	WOMF	100,00%	53,23%	14,45%	1,31%	10,22%	90,77%	0,00%	7,39%	56,91%
MEAN		100,00%	19,96%	29,92%	8,02%	21,94%	77,53%	0,02%	16,45%	21,92%

Berdasarkan tabel 4.21, maka rata-rata GPM untuk pembiayaan konsumen tahun 2006 untuk GPM sebesar 100%, OPM sebesar 19,96%, PPM sebesar 29,92%, CTTOR sebesar 8,02%, NPM sebesar 21,94%, DPR sebesar 77,53%, PPN sebesar 0,02%, Rasio Biaya gaji sebesar 16,45%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 21,92%.

Tabel 4.22
Rasio Benchmarking Pembiayaan Konsumen Tahun 2006 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PNGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	ADMF	1,78%	1,44%	10,90%	2,45%	2,33%
2	BFIN	0,84%	2,04%	16,65%	11,80%	0,38%
3	BBLD	3,17%	2,06%	15,56%	15,62%	0,00%
4	CFIN	1,81%	4,45%	11,83%	6,29%	0,71%
5	DEFI	3,85%	5,51%	30,32%	1,81%	0,85%
6	GSMF	1,42%	1,79%	11,23%	4,61%	1,98%
7	SMMA	0,54%	1,12%	5,03%	0,61%	1,30%
8	TRUS	1,71%	10,45%	9,12%	0,53%	0,00%
9	WOMF	1,92%	1,49%	23,06%	20,03%	0,97%
MEAN		1,89%	3,37%	14,86%	7,08%	0,95%

Berdasarkan tabel 4.22, maka rata-rata untuk pembiayaan konsumen tahun 2006 untuk Rasio Biaya Sewa sebesar 1,89%, Biaya Penyusutan sebesar 3,37%, Input lainnya sebesar 14,86%, Penghasilan Luar Usaha sebesar 7,08%, dan Biaya Luar Usaha sebesar 0,95%.

Tabel 4.23
Rasio Benchmarking Pembiayaan Konsumen Tahun 2007

NO	KodeP	GPM	OPM	PPM	CTTOR	NPM	DPR	PPN	RASIO BIAYA GAJI/PENJUALAN	RASIO BIAYA BUNGA/PENJUALAN
1	ADMF	100,00%	59,47%	33,15%	7,75%	23,17%	41,45%	0,00%	20,74%	33,09%
2	BFIN	100,00%	63,29%	54,94%	0,33%	39,48%	24,40%	0,00%	20,86%	21,12%
3	BBLD	100,00%	38,47%	49,01%	15,03%	33,97%	1,29%	0,00%	16,49%	23,00%
4	CFIN	100,00%	96,72%	4,41%	1,13%	3,50%	0,00%	0,00%	1,06%	2,51%
5	DEFI	100,00%	0,00%	2,12%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	64,03%	16,31%
6	GSMF	100,00%	0,05%	3,16%	0,60%	2,67%	0,00%	0,02%	11,08%	0,10%
7	SMMA	100,00%	9,44%	9,71%	0,44%	8,59%	0,00%	0,02%	2,57%	3,85%
8	TRUS	100,00%	64,69%	37,98%	11,40%	26,68%	0,00%	0,02%	16,50%	26,95%
9	WOMF	100,00%	-0,80%	-36,00%	0,00%	-25,15%	-12,43%	0,00%	13,48%	62,59%
MEAN		100,00%	36,81%	17,61%	4,07%	12,95%	6,08%	0,01%	18,53%	21,06%

Berdasarkan tabel 4.23, maka rata-rata GPM untuk pembiayaan konsumen tahun 2007 untuk GPM sebesar 100%, OPM sebesar 36,81%, PPM sebesar 17,61%, CTTOR sebesar 4,07%, NPM sebesar 12,95%, DPR sebesar 6,08%, PPN sebesar 0,01%, Rasio Biaya gaji sebesar 18,53%, dan Rasio Biaya Bunga sebesar 21,06%.

Tabel 4.24
Rasio Benchmarking Pembiayaan Konsumen Tahun 2007 (Lanjutan)

NO	KodeP	RASIO BIAYA SEWA/PENJUALAN	RASIO BIAYA PENYUSTN/PENJUALAN	RASIO INPUT LAINNYA	RASIO PNGHASILAN LUAR USAHA/PENJUALAN	RASIO BIAYA LUAR USAHA/PENJUALAN
1	ADMF	1,82%	1,50%	10,42%	2,81%	2,09%
2	BFIN	0,76%	1,76%	13,32%	12,50%	0,00%
3	BBLD	3,29%	2,62%	16,14%	10,62%	0,07%

4	CFIN	0,11%	0,34%	1,78%	2,20%	0,02%
5	DEFI	7,64%	5,37%	17,77%	14,75%	1,50%
6	GSMF	1,17%	1,25%	9,11%	3,11%	0,00%
7	SMMA	0,27%	0,60%	3,37%	0,28%	2,61%
8	TRUS	2,33%	8,84%	7,63%	0,24%	0,00%
9	WOMF	2,23%	1,36%	33,13%	28,27%	0,05%
MEAN		2,18%	2,63%	12,52%	8,31%	0,71%

Berdasarkan tabel 4.24, maka rata-rata untuk pembiayaan konsumen tahun 2007 untuk Rasio Biaya Sewa sebesar 2,18%, Biaya Penyusutan sebesar 2,63%, Input lainnya sebesar 12,52%, Penghasilan Luar Usahasebesar 8,31%, dan Biaya Luar Usaha sebesar 0,71%.

4.7 Analisis Rasio Benchmarking Sektor Perantara Keuangan

4.7.1 Klasifikasi Lapangan Usaha Bank Devisa

Tabel 4.25

Perbandingan Rasio Keuangan WP dengan Benchmark

No	Rasio Benchmarking	2005			2006			2007		
		WP	BENCH	SELISIH	WP	BENCH	SELISIH	WP	BENCH	SELISIH
Biaya Usaha										
1	HPP (100% - GPM)	41,82	33,07	8,75	54,25	35,87	18,38	42,36	36,13	6,23
2	Biaya Usaha Lain (GPM-OPM)	44,98	34,52	10,46	32,97	35,52	-2,55	38,4	34,85	3,55
3	Jumlah Biaya Usaha	86,8	67,59	19,21	87,22	71,39	15,83	80,76	70,98	9,78
Biaya Usaha terdiri dari :										
4	Gaji (g)	15,4	18,69	-3,29	12,83	17,17	-4,34	14,97	16,67	-1,7
5	Penyusutan (py)	2,3	1,99	0,31	2,14	1,86	0,28	1,92	2,03	-0,11
6	Sewa (s)	2,37	1,89	0,48	1,8	1,82	-0,02	1,85	1,82	0,03
7	Bunga (b)	55,03	18,38	36,65	60,46	19,21	41,25	53,01	11,91	41,1
8	Input lain (x)	18,37	12,37	6,00	15	13,75	1,25	16,66	29,76	-13,1
Koreksi Fiskal										
1	CTTOR / PPM	0,35	0,31	0,04	0,31	0,31	0,00	0,33	0,38	-0,05
Penghasilan & Biaya diluar usaha										
1	pl	3,47	1,19	2,28	1,19	0,50	0,69	1,18	0,69	0,49
2	bl	1,33	0,14	1,19	1,28	0,15	1,13	1,51	0,23	1,28
	Netto (pl-bl)	2,14	1,05	1,09	-0,09	0,35	-0,44	-0,33	0,46	-0,79
Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh										
1	Gaji	15,4	18,69	-3,29	12,83	17,17	-4,34	14,97	16,67	-1,7
2	Sewa	2,37	1,89	0,48	1,8	1,82	-0,02	1,85	1,82	0,03
3	Bunga	55,03	18,38	36,65	60,46	19,21	41,25	53,01	11,91	41,1
4	Input lain	18,37	12,37	6,00	15	13,75	1,25	16,66	29,76	-13,1

Berdasarkan tabel 4.25, untuk 14 rasio benchmarking yang paling besar selisihnya ada pada biaya bunga tahun 2005 sebesar 36,65%, tahun 2006 sebesar 41,25% dan tahun 2007 sebesar 41,1%.. Sedangkan rasio benchmarking yang lain menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Bank Devisa. Berdasarkan perbandingan diatas diketahui bahwa kinerja operasional perusahaan di atas benchmark. Jika dianalisis lebih lanjut, dapat di jelaskan sebagai berikut :

Aspek Biaya Usaha

- a) Berdasarkan perbandingan di atas diketahui bahwa kinerja operasional perusahaan di atas benchmark.
- b) Tingginya beban usaha tersebut karena HPP dan Biaya Usaha lain yang berada 9,78 % di atas benchmark.
- c) Perbandingan antara rasio-rasio g , py , s , b dan x Wajib Pajak terhadap benchmark menunjukkan bahwa proporsi beban gaji, beban penyusutan dan beban bunga terhadap penjualan masih di bawah benchmark. Rasio beban sewa terhadap penjualan sedikit di atas benchmark.
- d) Rasio bunga terhadap penjualan menunjukkan selisih yang cukup tinggi di atas benchmark. Untuk dapat melakukan analisis secara tepat terhadap hasil perbandingan tersebut, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi industri pada umumnya.
- e) Dari selisih-selisih tersebut terlihat bahwa selisih Biaya bunga terhadap benchmark memiliki tingkat risiko ketidakwajaran yang paling tinggi. Untuk itu, penelitian perlu difokuskan pada akun-akun yang berkaitan dengan biaya bunga.

Koreksi Fiskal

- a) Rasio-rasio benchmarking dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi fiskal suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark pada usaha sejenis.
- b) CTTOR/PPM Wajib Pajak SEDIKIT di atas benchmark, yang berarti koreksi fiskal yang dilakukan wajib pajak masih di bawah benchmark perusahaan sejenis.
- c) Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan.

Penghasilan dan Biaya Luar Usaha

- a) Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Penghasilan Luar Usaha Netto Wajib Pajak berada di atas benchmark, dengan nilai pl dan bl keduanya di atas benchmark.
- b) Tingginya pl bisa terjadi karena adanya penghasilan luar usaha yang bersifat insidental yang diterima oleh Wajib Pajak pada tahun yang bersangkutan, atau penghasilan lain yang diterima secara rutin oleh Wajib Pajak diluar dari usaha pokok Wajib Pajak yang tidak secara umum juga diterima oleh perusahaan lain dalam usaha sejenis.

- c) Karena rasio Penghasilan Luar Usaha diatas secara netto berada diatas benchmark, pendalaman lebih lanjut mengenai penghasilan luar usaha ini tidak perlu menjadi prioritas.

Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh

- a) Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Gaji/Penjualan berada dibawah benchmark, perlu diteliti lebih dalam apakah masih terdapat potensi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 yang masih dapat digali dengan memperhatikan alasan-alasan yang mungkin mengenai rendahnya rasio tersebut.
- b) Rasio Bunga/Penjualan terlihat berada di atas benchmark, menunjukkan tingginya potensi PPh Pemotongan dan Pemungutan yang masih dapat digali.

4.7.2 Klasifikasi Lapangan Usaha Asuransi

Tabel 4.26
Perbandingan Rasio Keuangan WP dengan Benchmark

No	Rasio Benchmarking	2005			2006			2007		
		WP	BENCH	SELISIH	WP	BENCH	SELISIH	WP	BENCH	SELISIH
Biaya Usaha										
1	HPP (100% - GPM)	62,80	54,43	8,37	64,20	54,43	9,77	69,68	54,43	15,25
2	Biaya Usaha Lain (GPM-OPM)	28,08	28,61	0,53	29,71	28,61	1,10	27,97	28,61	-0,64
3	Jumlah Biaya Usaha	90,88	83,04	7,84	93,91	83,04	10,87	97,65	83,04	14,61
Biaya Usaha terdiri dari :										
4	Gaji (g)	15,12	14,69	0,43	13,70	14,69	-0,99	14,98	14,69	0,29
5	Penyusutan (py)	1,71	2,43	-0,72	1,69	2,43	-0,74	1,74	2,43	-0,69
6	Sewa (s)	0,61	2,94	-2,33	0,53	2,94	-2,41	0,51	2,94	-2,43
7	Bunga (b)	62,80	0,00	62,80	64,20	0,00	64,20	69,68	0,00	69,68
8	Input lain (x)	9,38	22,53	-13,15	9,53	22,53	-13,00	10,70	22,53	-11,83
Koreksi Fiskal										
1	CTTOR / PPM	0,11	0,30	-0,19	0,09	0,30	-0,22	0,07	0,30	-0,23
Penghasilan & Biaya diluar usaha										
1	PI	1,92	8,67	-6,75	0,76	8,67	-7,91	1,37	8,67	-7,30
2	Bl Netto (pl-bl)	0,16	0,06	0,16	0,50	0,06	0,44	0,06	0,06	0,00
Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh										
1	Gaji	15,12	14,69	0,43	13,70	14,69	-0,99	14,98	14,69	0,29
2	Sewa	0,61	2,94	-2,33	0,53	2,94	-2,41	0,51	2,94	-2,43
3	Bunga	62,80	0,00	62,80	64,20	0,00	64,20	69,68	0,00	69,68
4	Input lain	9,38	22,53	-13,15	9,53	22,53	-13,00	10,70	22,53	-11,83

Berdasarkan tabel 4.26, untuk 14 rasio benchmarking yang paling besar selisihnya ada pada biaya bunga tahun 2005 sebesar 62,80%, tahun 2006 sebesar 64,20% dan tahun 2007 sebesar 69,68%. Kemudian HPP terdapat selisih di tahun 2005 sebesar 8,37%, tahun 2006 sebesar 9,77% dan tahun 2007 sebesar 15,25%. Sedangkan rasio benchmarking yang lain menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Asuransi.

Aspek Biaya Usaha

- a) Berdasarkan perbandingan di atas diketahui bahwa kinerja operasional perusahaan sedikit di bawah benchmark
- b) Rasio-rasio Wajib Pajak terhadap benchmark menunjukkan bahwa proporsi beban penyusutan dan beban sewa terhadap penjualan masih di bawah benchmark. Rasio beban gaji terhadap penjualan sedikit di atas benchmark.
- c) Rasio bunga dan input lain terhadap penjualan menunjukkan selisih yang cukup tinggi di atas benchmark. Untuk dapat melakukan analisis secara tepat terhadap hasil perbandingan tersebut, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi industri pada umumnya.
- d) Dari selisih-selisih tersebut terlihat bahwa selisih Biaya bunga terhadap benchmark memiliki tingkat risiko ketidakwajaran yang paling tinggi. Untuk itu, penelitian perlu difokuskan pada akun-akun yang berkaitan dengan biaya bunga.

Koreksi Fiskal

- a) Rasio-rasio benchmarking dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi fiskal suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark pada usaha sejenis.
- b) CTTOR/PPM Wajib Pajak di bawah benchmark, yang berarti koreksi fiskal yang dilakukan wajib pajak masih di atas benchmark perusahaan sejenis.

Penghasilan dan Biaya Luar Usaha

- a) Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Penghasilan Luar Usaha Netto Wajib Pajak berada di bawah benchmark,
- b) Rendahnya PL bisa terjadi karena adanya penghasilan luar usaha yang bersifat insidental yang diterima oleh Wajib Pajak pada tahun yang bersangkutan, atau penghasilan lain yang diterima secara rutin oleh Wajib Pajak diluar dari usaha pokok Wajib Pajak yang tidak secara umum juga diterima oleh perusahaan lain dalam usaha sejenis.

- c) Rasio Penghasilan Luar Usaha diatas secara netto berada di bawah benchmark, diperlukan pendalaman lebih lanjut mengenai penghasilan luar usaha ini

Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh

- a) Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio sewa dan input lain terhadap Penjualan berada dibawah benchmark, perlu diteliti lebih dalam apakah masih terdapat potensi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23 yang masih dapat digali dengan memperhatikan alasan-alasan yang mungkin mengenai rendahnya rasio tersebut.
- b) Rasio Bunga/Penjualan terlihat berada di atas benchmark, menunjukkan tingginya potensi PPh Pemotongan dan Pemungutan yang masih dapat digali.

4.7.3 Klasifikasi Lapangan Usaha Pembiayaan Konsumen

Tabel 4.27

Perbandingan Rasio Keuangan WP dengan Benchmark

No	Rasio Benchmarking	2005			2006			2007		
		WP	BENCH	SELISIH	WP	BENCH	SELISIH	WP	BENCH	SELISIH
Biaya Usaha										
1	HPP (100% - GPM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Biaya Usaha Lain (GPM-OPM)	55,41	74,66	-19,25	80,04	52,74	27,30	63,19	52,74	10,45
3	Jumlah Biaya Usaha	55,41	74,66	-19,25	80,04	52,74	27,30	63,19	52,74	10,45
Biaya Usaha terdiri dari :										
4	Gaji (g)	14,68	20,16	-5,48	16,46	12,63	3,83	18,53	12,63	5,90
5	Penyusutan (py)	2,89	0,69	2,20	3,37	2,17	1,20	2,63	2,17	0,46
6	Sewa (s)	1,75	0,49	1,26	1,89	1,53	0,36	2,18	1,53	0,65
7	Bunga (b)	19,84	2,82	17,02	21,92	6,72	15,20	21,06	6,72	14,34
8	Input lain (x)	15,32	7,44	7,88	14,86	28,19	-13,33	12,52	28,19	-15,67
Koreksi Fiskal										
1	CTTOR / PPM	0,26	0,42	-0,15	0,27	0,39	-0,12	0,16	0,39	-0,23
Penghasilan & Biaya diluar usaha										
1	PI	4,68	8,91	-4,23	7,08	0,44	6,64	8,31	0,44	7,87
2	BI	2,22	5,49	-3,27	0,95	16,47	-15,52	0,71	16,47	-15,76
	Netto (pl-bl)	2,46	3,42	-0,96	6,13	-16,03	22,16	7,60	-16,03	23,63
Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh										
1	Gaji	14,68	20,16	-5,48	16,46	12,63	3,83	18,53	12,63	5,90
2	Sewa	1,75	0,49	1,26	1,89	1,53	0,36	2,18	1,53	0,65
3	Bunga	19,84	2,82	17,02	21,92	6,72	15,20	21,06	6,72	14,34
4	Input lain	15,32	7,44	7,88	14,86	28,19	-13,33	12,52	28,19	-15,67

Berdasarkan tabel 4.27, untuk 14 rasio benchmarking yang paling besar selisihnya ada pada biaya usaha lain di tahun 2005 sebesar 19,25%, tahun 2006 sebesar 27,30% dan tahun 2007 sebesar 10,45%. Lalu input lainnya tahun 2005 sebesar 7,88%, tahun 2006 sebesar 13,33% dan tahun 2007 sebesar 15,67%.. Sedangkan rasio benchmarking yang lain menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Pembiayaan Konsumen. .

Aspek Biaya Usaha

- a) Berdasarkan perbandingan di atas diketahui bahwa kinerja operasional perusahaan di bawah benchmark.
- b) Tingginya beban usaha tersebut karena HPP yang berada di atas benchmark.
- c) Rasio-rasio Wajib Pajak terhadap benchmark menunjukkan bahwa proporsi beban gaji, beban penyusutan dan beban sewa terhadap penjualan masih di atas benchmark..
- d) Rasio bunga dan input lain terhadap penjualan menunjukkan selisih yang cukup tinggi di atas benchmark. Untuk dapat melakukan analisis secara tepat terhadap hasil perbandingan tersebut, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi industri pada umumnya.
- e) selisih Biaya bunga terhadap benchmark memiliki tingkat risiko ketidakwajaran yang paling tinggi. Untuk itu, penelitian perlu difokuskan pada akun-akun yang berkaitan dengan biaya bunga.

Koreksi Fiskal

- a) CTTOR/PPM Wajib Pajak di bawah benchmark, yang berarti koreksi fiskal yang dilakukan wajib pajak sudah di atas benchmark perusahaan sejenis.
- b) Rasio WP lebih rendah dibanding benchmark, harus dianalisis secara hati-hati apakah Wajib Pajak yang bersangkutan melakukan kompensasi kerugian, sebelum dapat menarik kesimpulan adanya indikasi bahwa Koreksi Fiskal Positif/Negatif yang dilakukan ternyata lebih rendah dari yang seharusnya.

Penghasilan dan Biaya Luar Usaha

- a) Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Penghasilan Luar Usaha Netto Wajib Pajak berada di atas benchmark, dengan nilai pl dan bl keduanya di atas benchmark.
- b) Tingginya pl bisa terjadi karena adanya penghasilan luar usaha yang bersifat insidental yang diterima oleh Wajib Pajak pada tahun yang bersangkutan, atau penghasilan lain yang diterima secara rutin oleh Wajib Pajak diluar dari usaha pokok Wajib Pajak yang tidak secara umum juga diterima oleh perusahaan lain dalam usaha sejenis.

- c) Rasio Penghasilan Luar Usaha diatas secara netto berada diatas benchmark, pendalaman lebih lanjut mengenai penghasilan luar usaha ini tidak perlu menjadi prioritas.

Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh

- a) Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio input lain terhadap Penjualan berada dibawah benchmark, perlu diteliti lebih dalam apakah masih terdapat potensi PPh Pemotongan dan Pemungutan yang masih dapat digali dengan memperhatikan alasan-alasan yang mungkin mengenai rendahnya rasio tersebut.
- b) Rasio Bunga/Penjualan terlihat berada di atas benchmark, menunjukkan tingginya potensi PPh Pemotongan dan Pemungutan yang masih dapat digali.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan rasio benchmarking digunakan untuk mengetahui kewajaran laporan keuangan dan sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban perpajakan dari para wajib pajak khususnya lembaga keuangan seperti sektor Perbankan, Asuransi dan Pembiayaan Konsumen.

Rasio-rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi 14 rasio yang terdiri dari rasio-rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN dan rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan 14 rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada *benchmark*, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar..Namun perlu melakukan analisa lebih mendalam terhadap bisni Wajib Pajak. Dengan adanya *Total benchmarking*, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai.

Saran untuk penelitian selanjutnya juga membahas Benchmarking pada KLU lain yang merupakan penyumbang pajak terbesar di Indonesia sehingga dapat memperkaya hasil penelitian dan untuk membuktikan apakah benchmarking yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand G, Kodali R. 2008. Benchmarking the Benchmarking Models. *Benchmarking : An International Journal* 15 (3) : 257 – 291.
- Antaranews.com. Selasa, 8 Januari 2013. Pemerintah kejar target penerimaan pajak 2013
- Dattakumar R, Jagadeesh R. 2003. A Review of Literature on Benchmarking. *Benchmarking : An International Journal* 10 (3) : 176 – 209.
- Denkena B, Apitz R, Liedtke C. 2006. Knowledge – based Benchmarking of Production Performance Benchmarking : *An International Journal* 13 (1/2) : 190 – 199.
- Dragolea L, Cotirlea D. 2009. Benchmarking – A Valid Strategy for the Long Term ?. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica* 11 (2) : 813 – 826.
- Elmuti D, Yunus K. 1997. An Overview of Benchmarking Process : A Tool for Continuous Improvement and Competitive Advantage. *Benchmarking for Quality Management & Technology* 4 (4): 229-243.
- Grundberg T. 2003. A Review of Improvement Methods in Manufacturing Operations. *International Journal of Productivity and Performance Management* 52 (2) : 89-93.
- Ma'arif MS., Hendri T. 2003. *Manajemen Operasi*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Martin F. 2008. A Performance Technologist's Approach to Process Performance Improvement. *International Society for Performance Improvement*. 47 (2) : 30 – 40.
- Moriarty JP, Smallman C. 2009. En Route a Theory of Benchmarking. *Benchmarking : An International Journal* 16 (4) : 484 – 503.
- Nyoman Darmayasa dan Nyoman Sentosa Hardika.2011. Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak.*Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 7 No. 3 Nopember 2011.
- PER 70/PJ/2007.Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.
- Pierre JS, Delisle S. 2006. An Expert Diagnosis System for the Benchmarking of SME's Performance. *Benchmarking : An International Journal* 13 (1/2) : 106 – 119.
- SE-96/PJ/2009 Tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya.
- SE-11/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap II.
- SE-68/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap III.
- SE-105/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap IV.
- SE-139/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap V.

- Steven et al. 2003. *Key Management Models : The Management Tools and Practices that will Improve Your Business*. London : Prentice Hall.
- Theresia Woro Damayanti, dan Eko Sukmono A. *Ratio Total Benchmarking Sesuaikah Dengan Kondisi Wajib Pajak? (Studi Pada Empat Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di BEI)*. 2011. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Watson GH. 1996. *Strategic Benchmarking : How to Rate Your Company's Performance against the World's Best*. Terjemahan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Williams SE. 2008. What has Benchmarking go to do with Evaluation ?. Di dalam : Mini Workshop AES International Conference. Perth.
- Yasin MM. 2002. The Theory and Practice of Benchmarking : Then and Now. *Benchmarking : An International Journal* 9 (3) : 217-243.